

**FENOMENA PINDAH PARTAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI
KABUPATEN MALANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



Disusun oleh :

AMARTA FAZA

NIM : 201610270211016

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Mei 2020**

FENOMENA PINDAH PARTAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN MALANG

Diajukan oleh :

**AMARTA FAZA
201610270211016**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Selasa/ 19 Mei 2020

Pembimbing Utama



Dr. Rinikso Kartono

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ishomuddin

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi



Prof. Dr. Ishomuddin

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

AMARTA FAZA

201610270211016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa/ 19 Mei 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Rinikso Kartono

Sekretaris : Prof. Dr. Ishomuddin

Penguji I : Dr. Wahyudi

Penguji II : Dr. Asep Nurjaman

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **AMARTA FAZA**
NIM : **201610270211016**
Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **FENOMENA PINDAH PARTAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN MALANG** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Mei 2020
Yang menyatakan,



AMARTA FAZA

FENOMENA PINDAH PARTAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN MALANG

ABSTRAK

Amarta Faza

amartafaza@gmail.com

Pembimbing I: Dr.Rinikso Kartono,M.Si. (0718036501)

Pembimbing II: Prof.Dr.Ishomuddin,M.Si (0717045901).

Magister Sosiologi Direktorat Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Malang

Penelitian ini membahas tentang fenomena pindah partai politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Malang menjelang masa Pemilihan Umum Legislatif 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali motivasi tindakan berpindah partai politik, melalui analisa terhadap dua komponen utama Tindakan, yaitu yang pertama, pemahaman aktor terhadap partai politik serta yang kedua alasan dan pertimbangan berpindah dalam proses pembuatan keputusan berpindah partai. Dua komponen utama ini akan dianalisa dengan menggunakan perspektif Teori Tindakan Sosial dari Max Weber serta Model Perilaku berpindah partai politik dari Alan Ware yang berusaha menjelaskan pola berpindahan partai politik. Data dan informasi penting dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam serta observasi pada empat orang informan yaitu para politisi yang melakukan tindakan pindah partai sebagai aktivitas utama penelitian.

Kata kunci: perpindahan partai politik, motivasi, tindakan sosial

**THE PHENOMENON OF POLITICAL PARTY CHANGING
BY THE CANDIDATE OF LOCAL PARLIAMENTARY MEMBER'S IN
MALANG REGENCY**

ABSTRACT

Amarta Faza

amartafaza@gmail.com

First Adviser: Dr.Rinikso Kartono, M.Si. (0718036501)

Second Adviser: Prof.Dr.Ishomuddin, M.Si (0717045901)

Master Degree Thesis in Sociology Postgraduate Program

Muhammadiyah University of Malang

This research discuss about the phenomenon of social action of changing political party by candidates of local parliamentary member in Malang Regency close to Legislative Election Period in 2019. The aim of this research is to reveal the basic motivation of their action by changing political party through analysis of two main internal and individual factors which are first, their understanding of political party itself and their reason and calculation during the decision making process. These two factors analyze as in the perspectives of Max Weber, Social Action Theory and the Model Behaviour of Alan Ware in order to explain why politicians changing their political party. The information and data for this research obtain by depth interview and observation method to four politicians as an informant of this research, as the main activity of this research.

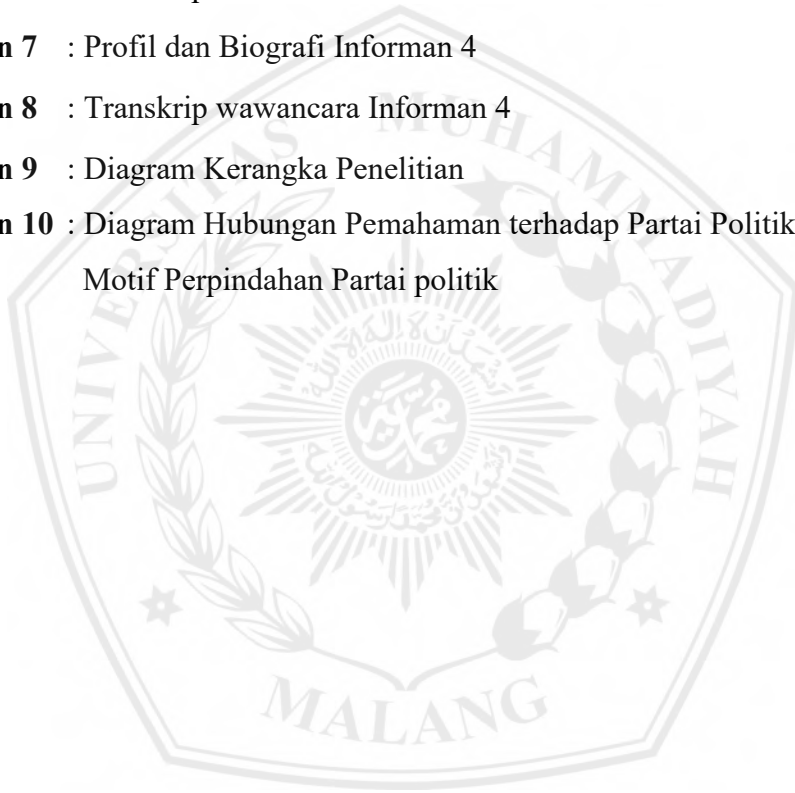
Keyword: *political party changing, motivation, social action*

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
B. TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
1. Penelitian Terdahulu	5
2. Konsep Nomadisme Politik	8
3. Teori Tindakan Sosial Max Weber	11
C. METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	14
2. Subyek Penelitian	14
3. Teknik Pengumpulan Data:	
a. Wawancara	16
b. Observasi	17
4. Teknik Analisis Data	18
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Hasil Penelitian	18
a. Pemahaman Para Nomadis Politik terhadap Partai Politik	18
• Partai sebagai Saluran Aspirasi Politik	19
• Partai Politik sebagai “Kendaraan” Politik	21
• Partai Politik Sebagai Bagian dari Lingkungan Sosial	22
b. Motif Tindakan Berpindah Partai	23
• Dorongan Jabatan dan Status Sosial	23
• Pengaruh Kedekatan Personal	25
• Ketertarikan <i>platform</i> kampanye dan Ideologi partai.	26
2. Pembahasan Teoritik	28
a. Hasil Interview dalam Kerangka Teori Tindakan Sosial	28
b. Analisa Hubungan antara Pemahaman terhadap Partai Politik dengan Motif Perpindahan Partai Politik	30
c. Perpaduan Motif Perpindahan Partai	32
E. KESIMPULAN	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Profil dan Biografi Informan 1
- Lampiran 2** : Transkrip wawancara Informan 1
- Lampiran 3** : Profil dan Biografi Informan 2
- Lampiran 4** : Transkrip wawancara Informan 2
- Lampiran 5** : Profil dan Biografi Informan 3
- Lampiran 6** : Transkrip wawancara Informan 3
- Lampiran 7** : Profil dan Biografi Informan 4
- Lampiran 8** : Transkrip wawancara Informan 4
- Lampiran 9** : Diagram Kerangka Penelitian
- Lampiran 10** : Diagram Hubungan Pemahaman terhadap Partai Politik dengan
Motif Perpindahan Partai politik



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

“In politics no permanent friends, no permanent enemies but permanent interest.”

(Patience Jhonson).

Dalam politik tidak ada teman abadi, musuh abadi tetapi kepentingan pribadi, adagium di atas senada dengan apa yang terjadi dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Malang pada momen Pemilu Legislatif tahun 2019 ini. Walaupun Pileg kali ini diselenggarakan untuk pertama kali bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres), kontestasi Pileg tetap memiliki daya tarik tersendiri karena pergerakan para calon dan tim suksesnya selama masa kampanye yang menyentuh berbagai aspek sosial masyarakat, bila dibandingkan dengan kampanye partai politik atau calon pasangan Presiden-Wapres.

Menurut data KPUD Kabupaten Malang sebanyak 612 orang yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Malang (Nana, 2018). Calon anggota legislatif tersebut tersebar di 7 daerah pemilihan (DAPIL). Ke 7 wilayah Dapil ini memperebutkan 50 kursi DPRD (Nana, 2018). Konstelasi kekuatan antar partai politik di juga cukup dinamis dengan dominasi tradisional PDI-P dan PKB yang mencoba bertahan, isu perpecahan Golkar sepeninggal sang ketua DPD yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Malang, Rendra Kresna ke NasDem yang kemudian diperhitungkan akan melejit perolehan kursinya pada pileg 2019 kali ini.

Pileg 2019 menggunakan aturan penghitungan suara sistem *saint league*. Sistem perhitungan ini menekankan pembagian kursi berdasarkan akumulasi terbanyak jumlah suara partai terlebih dahulu sebelum kemudian dibagi dengan bilangan ganjil 1,3,5 dan seterusnya.(Haryanto, 2018). Melalui sitem *saint league* diatas artinya harus ada kalkulasi dalam pencalonan diri mereka (Calon Anggota Legislatif) dalam kontestasi Pileg 2019. Sistem ini menjadikan Caleg sangat bergantung pada kekuatan partai politik, tidak seperti pada system *quota hare* sebelumnya yang menjadikan caleg bisa bekerja secara independen mengumpulkan suara terbanyak untuk dirinya sendiri.

Perubahan sistem perhitungan suara ini, sempat ditengarai sebagai dorongan banyak politisi berpindah partai demi mengamankan peluang keterpilihannya. Namun secara umum, gejala pindah partai ini ternyata merupakan hal yang lumrah dilakukan

oleh politisi di Indonesia baik pada panggung politik lokal maupun nasional misalnya Ahok (Basuki Cahaya Purnama) yang berpindah dari partai PIB (Partai perhimpunan Indonesia Baru) ketika mengikuti kontestasi politik sebagai Anggota Legislatif Kota Belitung dan kemudian berpindah ke Partai Golkar ketika maju sebagai Anggota Legislatif DPR RI tahun 2012. Kemudian diusung kembali oleh partai PDIP dan partai Gerindra untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2012 (detik.com, 2019). Ada juga Ruhut Sitompul, Dede Yusuf, Yuddi Krisnandi dan Ali Mochtar Ngabalin serta beberapa nama besar di pentas politik nasional lainnya (detik.com, 2019).

Tahun 2019, tercatat ada 19 politisi yang berpindah partai. Pertama politisi dari partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat), terdapat tujuh orang yang berpindah partai dari Hanura ke Nasdem dan PAN. Perpindahan ke partai lain juga terjadi di partai politik PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dua orang anggotanya berpindah ke partai Nadem dan PKS. Perpindahan anggota partai juga terjadi di tubuh PAN (Partai Amanat Nasional) ke Partai Nasdem. Serta dari Partai Golkar ke Partai Berkarya, PKB ke Nasdem hingga Gerindra ke Nasdem (jpnn.com, 2019).

Permasalahan pindah partai diatas, ternyata berimplikasi juga pada tubuh organisasi partai politik itu sendiri sehingga mengakibatkan lahirnya dualisme kepengurusan partai. Fakta tersebut misalnya terjadi di tubuh partai Golkar, PPP dan Hanura. Beberapa alasan atau motivasi pindah partai ini antara lain dilandasi oleh persepsi dan ketidak-sinkronan antara ideologi individu dengan ideologi partai politiknya, atau adanya tawaran posisi/ jabatan hingga adanya tawaran mahar yang lebih besar.

Fenomena ini kemudian memberikan dorongan terhadap matinya ideologi partai karena adanya proses transaksional di kalangan politikus dan partai politik. Bahkan dalam kasus terkini banyak anggota partai politik yang keluar dari suatu partai tertentu untuk mendirikan partai politik sendiri. Hal ini semisal SBY (Susilo Bambang Yudoyono) yang keluarga dari Partai Golkar mendirikan Partai Demokrat, Wiranto mendirikan Partai Hanura hingga Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra.

Menurut Titi, Direktur Perludem, bahwa perpindahan politisi dari partai politik ke partai politik lainnya sudah biasa dan sudah sejak lama terjadi, apalagi dalam konteks Indonesia, perpindahan partai politik semakin sering terjadi ketika perubahan sistem politik dari sistem tiga partai ke sistem multi partai pasca reformasi. Selain itu,

pasca reformasi juga menyediakan kemungkinan-kemungkinan terbentuknya partai politik baru yang menawarkan ideologi yang lebih "segar" ketimbang era Orde Baru. Ditambah lagi fenomena perpindahan partai ini dikarenakan memang adanya ideologi yang sebelumnya belum terfasilitasi. Kemudian mendapatkan sarananya melalui partai baru yang terbentuk pasca-reformasi dan menjadi peserta Pemilu 1999 (Kompas.com, 2019).

Fenomena pindah partai ini menghasilkan dua pandangan yaitu positif dan negatif. Secara positif, pindah partai adalah bentuk ketidak-puasan individu politisi terhadap apa yang terjadi di tubuh partai sehingga menuntut politisi memilih partai lain untuk dapat mengakomodir kepentingan pribadinya. Dalam pandangan positif, individu melihat bahwa dalam tubuh organisasi partai politik sudah tidak ada lagi ideologi yang sejalan ataupun visi misi yang diusung oleh individu. Apabila demikian, partai politik yang sebelumnya dianggap tidak sejalan dengan apa yang menjadi ideologi individu, dianggap membutuhkan perubahan didalam tubuh partai politik tersebut.

Sedangkan pandangan negatif, ada kemunduran partai politik baik dari visi misi, ideologi dan sistem dalam tubuh organisasi partai. Pandangan negatif ini melihat pada aspek ketidakmampuan partai politik dalam mengakomodasi kepentingan anggota dalam partai politik, sehingga dianggap sebagai sebuah kegagalan konsolidasi politik antar anggota. Meskipun dua pandangan ini terlihat normatif, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap performa partai politik dan integritas individu dalam berpolitik.

Zainudin Amali, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar dalam diskusi Bacaleg (<http://www.tirto.id>, 2018) menjelaskan bahwa ada empat faktor motivasi yang mempengaruhi politisi untuk berpindah partai yaitu ideologi partai, konflik internal partai, masa depan partai, iming-iming fasilitas dari partai lain. Empat faktor motivasi tersebut menurutnya, akan sangat berpengaruh pada individu politisi yang dalam hal ini dapat dikatakan rasional dan memiliki preferensi masing-masing. Oleh karena itu apabila ideologi partai lemah atau luntur secara tidak langsung akan berpengaruh pada keinginan untuk berpindah partai politik, sedangkan faktor konflik internal akan menjadi perhitungan bagi kelangsungan kepentingan politisi dalam partai

dan hal ini akan berdampak pada pemikiran terhadap memburuknya kondisi partai yang di usungnya tidak dapat menjadi penopang untuk maju mendapatkan kursi.

Berkaca pada problematika faktor yang mendorong calon anggota legislatif berpindah partai bahwa perpindahan partai yang terjadi tentu saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan suatu integritas atau pondasi kuat dalam proses pendidikan politik baik di dalam proses pengkaderan di tubuh partai politik maupun di dalam kemajemukan masyarakat luas sehingga yang terjadi adalah lunturnya idealisme partai dan aktor politik yang nantinya dapat mewujudkan ketidak kestabilan politik.

Semakin besarnya perpecahan dalam tubuh partai dan banyaknya aktor politisi yang istilahnya “Lompat Pagar” secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas partai atau aktor itu sendiri, tentu hal ini juga berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Bahkan pandangan miring istilah Lompat Pagar ini di panggil sebagai “Kutu Loncat” (Jawapos, 2018). Apalagi fenomena ini banyak terjadi ketika menjelang pemilihan umum. Berkaitan dengan itu, bahwa perpindahan partai disebabkan oleh kepentingan personal atas perolehan suara dan kekuasaan atau jabatan. Dua indikasi faktor yang mempengaruhi perpindahan partai yaitu pengaruh internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dapat berasal baik dari individu ataupun partai politik. Keduanya memiliki intensi yang berbeda-beda, namun proses dan dinamika komunikasi politik di dalam partai politik dengan anggotanya sangatlah menentukan. Misalnya pengaruh ideologi, kepentingan yang lain dan keinginan untuk meraih kekuasaan yaitu kursi yang lebih besar (Astrika, 2013).

Fenomena pindah partai dan juga aturan dalam pemilihan umum terkait pencalonan politisi telah menyumbang khasanah pembangunan demokrasi di Indonesia. Adapun asumsi yang dapat dilihat dari dinamika politik pindah partai tersebut yaitu menjadi salah satu dinamisnya pembangunan sistem demokrasi melalui eksistensi partai politik yang memberikan pemaknaan bahwa semakin berkembangnya organisasi ataupun munculnya partai politik baru adalah indikator positif dalam penerapan sistem demokrasi. Oleh karena itu, partai politik menjadi salah satu sentral dalam negara demokratis seperti halnya Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tindakan sosial berpindah partai politik ke partai politik lainnya yang dilakukan oleh anggota legislatif dengan permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana pemahaman calon anggota legislatif yang berpindah partai tentang politik dan partai politik?
2. Apa motif yang mempengaruhi calon anggota legislatif yang berpindah partai?

B. TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat relevansi penelitian dengan penelitian yang lainya, hal ini guna mendapatkan perbandingan dan perbedaan dengan penelitian yang lain sehingga nantinya penulis mendapatkan gap serta mendukung *state of the art* dari penelitian yang sudah dilakukan.

Penelitian terdahulu bertajuk perilaku politik yang masing-masing dilakukan oleh (Denayu, Swami, 2017. Harahap, Rizki Rahman, 2014:13. Putra, 2017. Astrika, 2013. Sariani, Esti, 2015 dan Scarrow, 2017). Enam penelitian terdahulu tersebut menggunakan teori perilaku politik untuk mengidentifikasi tindakan politik yang dilakukan oleh Individu dalam pemilihan umum. Penelitian (Swami, 2017:30) melihat penekanan pada individu dengan pendekatan *behavioralisme* yang hal ini memfokuskan pada dua faktor berpengaruh dalam bertindak dan memutuskan yaitu faktor internal dari pengalaman dan latar belakang individu sebagai pemimpin pemerintahan. Perbedaan antara Penelitian (Swami, 2017) dan peneliti ini terletak pada objek yakni Swami lebih kepada perilaku individu politisi dari aspek sosial seperti pengalaman dan latar belakang individu sebagai calon anggota legislatif, sedangkan penulis lebih melihat pada perilaku politik berdasarkan pemahaman kepartaian dan motivasi untuk berpindah partai.

Kemudian (Rahman, 2104:13) menekankan pada faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Penelitian tersebut meliputi keputusan dan tindakan politik yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua aspek tersebut yaitu struktur

dan fungsi kelembagaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai politik dan tugas ataupun wewenang yang dijalankan. Sedangkan pengaruh tindakan politik masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor individu yang meliputi, persepsi, keinginan, dorongan pribadi, motivasi dan orientasi. Dalam hal ini fokus yang dikejar dalam penelitian (Rahman, 2014) berbeda dengan apa yang ditulis oleh peneliti dalam tesis ini, perbedaan tersebut terlihat pada indikator, Rahman, menitik beratkan pada tindakan politik dilihat dari faktor internal individu sedangkan penulis lebih melihat pada pemahaman individu terhadap partai politik dan faktor motivasi individu dalam melakukan tindakan politik. Sedangkan penelitian dari (Putra, 2017) melihat motivasi politisi berpindah partai. Penelitian yang dilakukan menggunakan konsep motive, partai politik dan teori pilihan rasional. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu bahwa ada empat motif yang mempengaruhi politisi untuk berpindah partai antara lain motif ekonomi, kekuasaan, keterpilihan dan pragmatisme politik. Perbedaan dari penelitian (Putra, 2017) dan penelitian ini terletak pada penggunaan teori yaitu pilihan rasional sedangkan penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dan untuk melihat perilaku politik ini dalam penelitian (Putra, 2017) yaitu konsep motif dan penelitian ini lebih kepada konsep nomandisme politik untuk menjelaskan perilaku berpindah partai politik.

Perbedaan fokus penelitian ini juga ditemukan dalam penelitian (Sarirani, Esti dkk, 2015:1-5) bahwa perpindahan partai politik dipengaruhi oleh motivasi personal dan menekankan pada penggunaan teori persepsi untuk melihat tindakan politik berpindah partai. Perbedaan ini juga dilihat dari penggunaan teori dan konsep yang digunakan yakni teori persepsi dan tesis ini teori tindakan sosial. Kemudian, penelitian (Astrika, 2013) dengan menggunakan teori pilihan rasional juga memperlihatkan bahwa tindakan berpindah partai didasarkan atas sikap dan norma yang didapat dari pilihan rasional. Adapun pilihan rasional yang mempengaruhi tersebut meliputi ketidak-jelasan pengelolaan organisasi, persoalan ideologi dan platform yang tidak jelas. Tentu hal ini berbeda dengan penelitian tesis yang dilakukan saat ini yaitu penelitian menggunakan teori tindakan sosial dan konsep nomandisme politik.

Terakhir, penelitian dari (Scarrow, 2017) yang melihat bahwa perubahan sikap dan sifat partai politik telah mempengaruhi keanggotaan dalam kepartaian. Menurutnya, bahwa hubungan antara kekuatan organisasi ditingkat *grassroot* akan

berpengaruh pada stabilitas sistem kepartaian. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan modeling sistem kepartaian lama dan kepartaian baru. Dalam hal ini, perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan teori dan konsep untuk menjelaskan hubungan antara pemahaman kepartaian dan motivasi terhadap perpindahan partai politik.

Melalui studi penelitian terdahulu diatas, penulis menemukan perbedaan bahwa ada banyak faktor dan motivasi individu, personal politisi dan atau anggota partai berpindah partai. Faktor dan motivasi yang sudah ada tersebut dapat menjadi rujukan penulis dalam penelitian tindakan sosial pindah partai ini. Kemudian, melalui studi penelitian terdahulu ini penulis dapat menemukan argumen-argumen yang nantinya dapat memperkuat posisi penelitian ini, sekaligus dapat membedakan posisi peneliti dengan posisi penelitian yang ada sebelumnya.

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Kesimpulan
Rizki Rahman Harahap	2014	Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten	Perilaku politik masyarakat	Perilaku politik masyarakat di pengaruhi lingkungan kehidupan sosial
Esti Sarirani	2014	Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Pindah Partai oleh Calon Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri	Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Pindah Partai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politisi pindah partai di dorong oleh motivasi pribadi ▪ Dipersepsi negatif karena menunjukkan inkonsistensi dan integritas terhadap partai politik
Denayu	2017	Perilaku Politik dan Kekuasaan Politik	Perpindahan partai politik	Perpindahan partai Ahok dipengaruhi:

			oleh politisi Basuki Cahaya Purnama (Ahok)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ faktor internal partai (dinamika kaderisasi) ▪ faktor internal individu (perilaku politik, sisi historis, ideologi, serta harapan dan tujuan karir politik)
Inra Reskia Putra	2017	Analisis Perilaku Pindah Partai Pada Partai Politik di Kabupaten Gowa	Motivasi individu politisi untuk berpindah ke partai politik lain	Perpindahan parpol dipengaruhi oleh faktor: kekuasaan, ekonomi, pragmatis dan keterpilihan dalam Pileg

2. Konsep Nomandisme Politik

Perilaku tindakan sosial dalam perpindahan partai politik yang dilakukan oleh anggota legislatif merupakan tindakan yang wajar karena didasari oleh pemikiran atau rasionalitas masing-masing personal. Sebagai aktor rasional yang memiliki kalkulasi untung dan rugi dalam memilih untuk berpindah partai di dunia politik adalah hal yang biasa karena rasionalitas mereka berasas pada tujuan dan kepentingan. Meskipun nantinya berpengaruh pada citra diri “kutu loncat” namun bagi individu sebagai aktor politik pindah partai adalah wajar dan sah-sah saja, hal ini karena beberapa alasan dan motif untuk melakukan tindakan pindah partai. Adapun alasan dan motif tersebut meliputi ideologi partai dan ideologi individu. Perbedaan prinsip antara individu dan partai sering dilatar belakangi oleh rasa kekecewaan terhadap partai sebagai kendaraan politiknya untuk mencapai keinginan mereka atau bahkan ketidakpuasan dan kondisi politik internal partai yang memaksa mereka untuk keluar partai.

Di dalam pemahaman Deleuze dan Guattari “*Nomadology: The War Machine*” dalam (Piliang, 2005) menjelaskan bahwa yang dikatakan nomad adalah entitas politik yang sifatnya berpindah-pindah, bertransformasi, bermutasi, berkembang, menolak identitas tunggal, tidak menetap, mengalir dan selalu berubah-ubah. Begitupun juga dengan (Piliang, 2005:12) berpendapat bahwa tren di arena politik saat ini banyak di

isi oleh para Nomad, yaitu orang atau individu personal yang menyukai berpindah haluan politik (*nomadism politics*), yaitu melakukan perpindahan dari partai ke partai lain, dari identitas ke identitas yang berbeda, dan dari ideologi ke ideologi lain.

Berdasarkan argumen diatas bahwa perilaku tersebut tentu tidak seperti para politisi yang mempunyai satu ketetapan (*sedentarity*) politik baik dari ideologi, identitas maupun, ketetapan terhadap partai politik. Hal tersebut yang dikatakan oleh (Piliang, 2015:24) bahwa nomad politik adalah orang yang tidak punya ketetapan ideologi, identitas dan keyakinan diri. Hal senada yang dikemukakan oleh (Ikechukwu, 2015: 75-76) bahwa para politik nomad tidak menggunakan etika dan rasa malu yang dalam hal ini secara tidak langsung menciptakan para nomad politik di kancan nasional. Hal ini yaitu politikus dan kelompok politik yang cenderung menyukai berpindah (*nomadism*) atas dasar kepentingan politik masing-masing, dan hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra, identitas, lambang, moto dan partai politiknya. Maka dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa para nomad politik ini berpengaruh terhadap perilaku dalam politiknya sehingga dalam dinamika lingkungan sosial politiknya akan menciptakan semacam 'nomadisme politik' (*political nomadism*) (Ikechukwu, 2015).

Kemudian gejala perilaku politik yang ditunjukkan oleh politisi nomad adalah penggunaan strategi pencitraan melalui sarana kampanye untuk menggambarkan eksistensinya. Hal ini ditujukan demi mendapatkan dukungan dan mempengaruhi opini publik. Bahkan aktor politisi nomad yang selalu berubah, berpindah dari satu citra ke citra yang lain akan semakin dikenal di publik. Perilaku politisi nomad tersebut dalam ilmu psikologi dinamakan inkonsisten, nomaden dan tidak adanya ketetapan diri atau integritas (Ikechukwu, 2015). Melalui problematika perilaku nomad tersebut bahwa pragmatisme politik terhadap partai politik erat kaitannya dengan perpindahan partai. Dengan demikian konsep nomandisme politik digunakan untuk menganalisa motif politisi berpindah partai politik.

Selanjutnya, dalam kacamata perilaku politik yaitu tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan politik. Proses tersebut melibatkan interaksi antar entitas seperti pemerintah, masyarakat, atau dalam bahasa (Surbakti, 1992:131) adalah proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

Penelitian ini fokus dalam menjelaskan perilaku elite politik yang melakukan tindakan pindah partai menjelang pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Malang.

Apabila melihat pada unit analisa perilaku politik diatas bahwa dinamika politik saat ini telah mengalami perubahan fungsi dan berubahnya nilai dari partai politik, Hematnya partai politik dalam ranah ideologis dan integritas maupun loyalitas kader telah mengalami perubahan terkait loyalitas. Permasalahan tersebutlah yang menjadikan politisi untuk berpindah partai politik karena politisi membutuhkan aktualisasi politik berdasarkan atas keyakinan dan tujuan yang dianggap sama. Berkaitan dengan itu (Wayenberg, 1992:99-105) melihat bahwa dalam konteks ideologi partai politik tidak dapat mengikat perilaku politisi, dan sebaliknya, tindakan politisi ini tidak dapat di cerminkan sebagaimana ideologi yang melekat dalam partai politik. Sejalan dengan itu, Bernard Flynn dalam (Wayenberg, 1992) bahwa politik berkembang sebagai politik *postmetafisik* yang artinya politik tidak dapat dikendalikan hanya pada faktor kelembagaan saja karena mengacu pada kepentingan dua belah pihak sehingga politik saat ini tidak dapat diprediksi dalam kaitan arah dan tujuan. Untuk itu, menurutnya politik yang berkembang saat ini telah kehilangan pondasi sebagai pilar ideologis dan politik menjadi irasional, hanya dipermukaan, kualitas dangkal, bersifat *illogical* dan ironis (Wayenberg, 1992). Persoalan tersebut juga di utarakan oleh (Piliang, 2005:12) bahwa ideologi haruslah dilakukan melalui proses kaderisasi politik yaitu dengan pendidikan politik yang harapannya dapat menghasilkan politik yang teladan.

Dalam buku “Politikus Busuk”, Zainuddin Maliki mengungkapkan pola perilaku elite politik yang mengedepankan kepentingan partai dan kelompoknya sebagai landasan utama dalam bepolitik. Perilaku ini disebut sebagai *politic for it self* yang dapat dimaknai sebagai pemahaman terhadap aktivitas politik dan fungsi partai politik secara sempit untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan yang berujung pada kesejahteraan pribadi maupun kelompok. Hal ini mendasari penjelasan pada kecenderungan koruptif aktor politik baik pada lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. (Maliki, 2004)

Kecenderungan perilaku koruptif ini dan pandangan moral yang longgar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam dunia politik ini, menurut Zainuddin Maliki didasarkan atas pemahaman bersama tentang politik itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan secara mendalam perilaku elite politik berpindah partai berdasarkan pada upaya-upaya penggalan data dengan perspektif Weberian yang justru mengedepankan aspek subjektif. Jadi tindakan atau keputusan untuk mengambil strategi politik yang sama, misalnya berpindah partai, tetapi dilandasi oleh alasan-alasan subjektif yang berbeda.

3. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Berkaitan dengan analisa teoritik perpindahan partai politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, penulis menggunakan teori tindakan sosial. Tindakan sosial dalam studi sosiologi merupakan studi yang melihat hubungan antar sosial yakni hubungan antar manusia. Sebagai salah seorang pemikir besar sosiologi, Max Weber berkeyakinan bahwa fenomena sosial tidak bisa disederhanakan penjelasannya melalui agen/aktor atau melalui struktur semata. Penjelasan fenomena sosial harus berdasarkan pada *interplay* antar kedua elemen tersebut.

Max Weber dalam tindakan sosial atau definisi sosial adalah tindakan yang tindakan tersebut ditujukan untuk orang lain (Siahaan, 1989:90). Artinya ada kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk berhubungan dengan orang lainnya, dan hubungan tersebut secara tidak langsung harus memenuhi langkah-langkah untuk memulainya yaitu misalkan ada tujuan, kepentingan, motif dan keinginan ataupun harapan. Dalam hal ini (Weber, 1978) mendefinisikan tindakan sosial, *'acting individual attaches a subjective meaning to his behaviour— be it overt or covert, omission or acquiescence. Action is "social" insofar as its subjective meaning takes account of the behavior of other and is thereby oriented in its course'* (Harvey, 2012).

Menurut Weber bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu bersifat subjektif baik secara terbuka ataupun terselubung, kelalaian dan persetujuan. Dan tindakan subjektif tersebut dipandang sejauh mana memperhitungkan orang lain. Tindakan sosial Weber ini misalnya bahwa individu manusia dalam kehidupan sosial masyarakat adalah aktor yang kreatif dan melihat realitas sosial bukanlah sebagai medium yang bersifat statis (tetap) pada tatanan yang kaku dan dalam fakta sosial bersifat memaksa. Pengertian ini merujuk pada tindakan manusia sepenuhnya bukanlah ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan hal-hal yang melingkupi fakta sosial (Wirawan, 2017:79). Meskipun demikian, Weber

mengakui bahwa dalam fakta sosial di masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial ini merupakan dua konsep yang memiliki keterhubungan dalam membentuk tindakan sosial (Wirawan, 2017).

Selanjutnya, Weber dalam (Ritzer, 2001) membagi empat klasifikasi dalam tindakan sosial yaitu tindakan afektif (*affectual action*), tindakan tradisional (*traditional action*), instrumental (*zwerk rational*), dan tindakan rasional nilai (*werkrational action*). Empat tipe tindakan ini didasarkan atas rasionalitas tindakan sosial bahwa semakin rasional tindakan sosial akan mudah dipahami. Begitupun dengan Parson dalam Ritzer (2004:78) bahwa tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber dalam (Ritzer (2004:78) ini disusun dengan skema yang terdiri dari unit-unit dasar. Skema dari unit dasar ini meliputi individu sebagai aktor dan aktor adalah sang pemburu kepentingan. Proses perburuan tersebut meliputi penggunaan alternatif cara, penggunaan alat, dan beberapa teknik untuk mendapatkan tujuan kepentingannya. Selain itu, aktor dalam prosesnya selalu mempunyai preferensi pilihan berdasarkan kondisi dan situasi yang dihadapi. Terakhir, aktor akan dihadapkan pada aspek nilai, norma yang nantinya akan berpengaruh terhadap pilihan keputusan atau tujuan yang di rencanakan.

Kemudian, Johnson dalam (Upe, 2008) bahwa tindakan sosial memiliki makna subjektif bagi dan dari aktor pelakunya. Subyektifitas ini melihat pada dorongan untuk berbuat dan bertindak yaitu motivasi. Dorongan dari motivasi inilah yang menjadi satu cerminan seseorang dalam masyarakat ataupun cerminan dari masyarakat itu sendiri. Perilaku dan tindakan dapat dikatakan sebagai sosial apabila tingkah laku dan perbuatannya menunjukkan motif-motif untuk kepentingan keseragaman dan bersifat tetap. Tindakan ini disebut oleh Weber melalui konsep *Verstehen* yang mana konsep ini digunakan untuk melihat dan memahami tindakan seseorang dengan asumsi bahwa seseorang tidak hanya bertindak tetapi seseorang tersebut juga menempatkan diri dalam lingkungan dan perilaku orang lain, hematnya adalah bahwa tindakan seseorang dalam masyarakat ataupun individu bertindak berdasarkan motif karena tujuan yang ingin dicapai atau *in order to motive* (Upe, 2008:183).

Selanjutnya, Nashir (1999) dalam (Upe, 2008:93) menjelaskan bahwa dalam proses politik, seorang aktor atau politisi selalu mengejar kepentingan baik di masyarakat sebagai pendukung atau privat sebagai kolega. Untuk itu, masyarakat dan

privat adalah sasaran utama seorang aktor politisi karena mereka inheren dalam proses penentuan sikap dan tindakan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Weber bahwa pemahaman pada perilaku manusia tidak hanya bisa dinilai dari perilakunya saja sebagai fakta sosial tetapi juga motif atau latar belakang yang melandasi perilaku tersebut karena perilaku yang sama belum tentu didorong oleh motif yang sama.

Oleh karenanya, Weber mendefinisikan kajian sosiologi adalah ilmu tentang institusi sosial. Didalam pengertiannya sebagai institusi sosial adalah berkaitan dengan tindakan sosial yang didalamnya melibatkan individu manusia, oleh karena itu tindakan sosial Weber menekankan pada arah keyakinan, motivasi dan tujuan diri manusia sebagai masyarakat dalam struktur sosial. Demikian dengan institusi sosial, dalam hal ini yaitu partai politik yang memiliki perilaku, norma, nilai dalam pengorganisasiannya layaknya individu yang bertindak atas norma, nilai sehingga membentuk perilaku dalam pranata sosial.

Berkaitan dengan itu, dalam kerangka tindakan sosial ada tiga faktor yang mempengaruhi calon anggota legislatif berpindah partai. Menurut Alan Ware (1999), tiga faktor pengaruh pertama yaitu *material incentives*, Kedua, *solidarity incentives*, dan ketiga *purposive incentives*, ketiga faktor tersebutlah yang menjadi dasar keyakinan ideologi seorang individu, personal atau aktor politik dalam bertindak.

Di dalam studi kasus perpindahan calon anggota legislatif yang berpindah partai di Kabupaten Malang ini memiliki tiga kriteria yang disebutkan oleh Alan Ware, yaitu pertama faktor *material incentive* mereka lebih melihat pada aspek kepentingan dalam meraih kekuasaan atau jabatan. Faktor kedua, solidaritas insentif yaitu anggota legislatif yang berpindah partai di dorong atas solidaritas elit yang menjadi rujukan baik itu legitimasi maupun secara ideologis. Faktor ketiga yaitu tujuan insentif yang mana perpindahan partai politik didasari oleh keyakinan ideologis terhadap kepartaian.

Berdasarkan ketiga faktor diatas bahwa selain keterhubungan antara politisi sebagai aktor dengan partai politik, ternyata eksistensi partai dapat diidentifikasi dari sejauh mana partai politik dalam melaksanakan rekrutmen yaitu proses kaderisasi anggota baru dan anggota lama. Sedangkan perilaku aktor politik dapat dilihat dari beberapa dorongan yang mempengaruhi perilaku aktor politik tersebut. Sebagai bentuk tindakan sosial mereka mempunyai dan melakukan dengan tujuan tertentu dan memiliki motif, kesadaran dan preferensi-preferensi cara ataupun alat yang digunakan.

Dilain itu dapat dikatakan tindakan sosial disebabkan oleh preferensi dari eksternal yaitu bersinggungan dengan sosial masyarakat. Untuk itu perilaku calon anggota legislatif yang berpindah partai adalah hasil kalkulasi antaran kepribadian, integritas politik, etika politik, dan struktur proses politik yang dilakukan secara menyeluruh.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986:9) dalam (Moleong, 2008) bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya ataupun dalam peristilahanya. Kemudian, menurut (Tylor, (1975:5) pengamatan ini melihat pada pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu yakni sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Didalam definisi penelitian kualitatif (Denzin dan Lincoln, 1987) bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Melalui pengertian diatas dapat dimaknai bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian antara lain persepsi, motivasi dan tindakan yang secara holistik dideskripsikan melalui kata dalam kata dalam kalimat dna bahasa.

2. Subyek Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan motivasi individu calon anggota legislatif berpindah partai politik. Pemahaman terhadap partai politik ini nantinya akankah berpengaruh terhadap calon anggota legislatif untuk berpindah partai. Pemahaman terkait partai politik ini dilihat sebagai sebuah proses untuk mengetahui sejauh mana secara personal pengetahuan terkait partai politik dan proses ini menjadi dasar untuk menggali motivasi para calon anggota legislatif berpindah partai. Motivasi ini yang nantinya diharapkan dapat menggambarkan bahwa perpindahan partai politik yang dilakukan calon anggota

legislatif sebagai sebuah tindakan sosial dan mengarah pada definisi nomandisme politik.

Berdasarkan kebutuhan informasi yang akan digali, maka penulis menunjuk informan atau subyek penelitian ini. Penentuan subyek penelitian ini dilandasi oleh keterlibatan sosial secara tidaklangsung di tempat dimana peneliti dan subyek bekerja yaitu sebagai calon anggota legislatif yang berkompetisi di pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Malang dan anggota legislatif yang saat ini menjabat di DPRD Kab. Malang.

Tabel Narasumber Penelitian

A/N	USIA	L/P	KARIR	ASAL	TUJUAN	PENGALAMAN
AA	54	L	Anggota DPRD/ Lawyer	Golkar	NasDem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota DPRD Kab. Malang ▪ Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab. Malang ▪ Sekretaris DPC Partai Golkar Kab. Malang ▪ Ketua Banleg DPRD Kab. Malang
IA	43	L	Swasta		NasDem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisioner KPU ▪ Ketua GMNI Malang ▪ Sekretaris DPD KNPI Kab. Malang
SA	43	L	Anggota DPRD	Golkar	NasDem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota DPRD Kab. Malang ▪ Jurkam Partai Golkar
SW	51	P	Ibu Rumah Tangga	Golkar	NasDem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AMPG ▪ Garnita Malahayati

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara primer dengan penelitian lapangan yaitu wawancara langsung dengan obyek penelitian yakni narasumber yang telah ditentukan. Teknik tersebut digunakan untuk telaah mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian (*research question*) yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian lapangan yang dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara adalah bentuk aktivitas utama untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi secara holistik.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan dengan cara tanya jawab. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan teknik bertatap muka antara peneliti dengan informan melalui *interview guide*. Maksud dan tujuan tersebut seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) dalam (Moleong, 2008:186) bahwa wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian.

Sedangkan menurut (Koentjaraningrat, 1977) wawancara adalah metode penelitian sebagaimana dijelaskan yaitu *“Metode wawancara atau interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.”*

Dalam penjelasan di atas metode wawancara tidak seperti percakapan biasa, wawancara menekankan adanya strategi dan persiapan-persiapan tertentu yang membedakan wawancara dengan percakapan biasa. Strategi dan persiapan yang dilakukan meliputi banyak hal dari mulai menyusun daftar orang yang akan diwawancarai hingga menyusun daftar pertanyaan dan alternatifnya untuk mengarahkan wawancara untuk memperoleh informasi yang berguna bagi penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dan tanya jawab dilakukan terhadap beberapa calon anggota legislatif yang ikut dalam kompetisi pemilihan umum tahun 2019 dan melakukan pindah partai politik. Asumsi dasar terkait tindakan berpindah partai yang dilakukan oleh calon anggota legislatif ini menjadikan penulis untuk merancang serta menyusun permintaan wawancara terhadap beberapa pihak yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria informan seperti pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan melakukan pindah partai ketika mencalonkan atau mendaftarkan diri. Pemilihan kriteria ini dianggap kompeten dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengambilan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat lain untuk membantu keperluan tersebut. Dalam penelitian kualitatif pengamatan merupakan proses penting yang menurut Guba dan Lincoln, (1981:191-193) dalam (Moleong, 2008:174-175) bahwa pertama teknik pengamatan adalah mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, kebiasaan dan sebagainya.

Teknik observasi atau pengamatan ini dibagi atas dua cara yaitu pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur. Pengamatan terstruktur yaitu peneliti telah mengetahui aspek apa saja yang aktivitas terkait yang diamati sehingga relevan dengan masalah serta tujuan peneliti, dengan mengungkapkan secara sistematis untuk menguji hipotesisnya. Salah satu ciri khas yang digunakan dalam pengamatan terstruktur adalah dengan alat membuat kategorisasi dan *rating scale* (skala nilai). Proses ini menurut Festinger dan Katz (1976:38-389) dalam (Moleong, 2008:180-181) melalui kategorisasi yang tepat maka peneliti dapat melahirkan kerangka referensi untuk pengamat yang dalam hal ini dapat meningkatkan kemungkinan bahwa aspek yang relevan dapat diamati secara lebih terpercaya.

Sedangkan pengamatan tidak terstruktur yaitu peneliti tidak mengetahui aspek apa dari kegiatan yang ingin diamati relevan dengan tujuan penelitiannya. Peneliti juga tidak mempunyai rencana tentang tata cara pencatatan dari pengamatan sebelum memulai mengumpulkan data. Hal terpenting yang dapat diperhatikan dalam pengamatan tidak terstruktur yaitu isi dari pengamatan mencatat pengamatan, ketepatan pengamatan dan hubungan antara pengamat dan yang diamati.

Observasi atau pengamatan ini dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data valid. Oleh karenanya pengamatan menyasar pada rekan kerja dengan ruang lingkup yang sama. Proses pengamatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan yang telah ditunjuk sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam tahapan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah terkumpul dari aktivitas penelitian berupa transkrip hasil wawancara mendalam dengan responden yang kemudian dilengkapi dengan kajian observasi terhadap responden penelitian. Analisa terhadap data dan informasi dilakukan dengan menggunakan teori dan pendekatan yang telah dipilih dan dinyatakan dalam deskripsi penyajian hasil penelitian dan uraian diskusi teoritik, yang diarahkan secara terstruktur untuk menjawab dua pertanyaan penelitian.

Hasil wawancara pada beberapa calon anggota legislatif yang berpindah partai digunakan untuk menjelaskan persepsi responden terhadap partai politik dan faktor-faktor yang memotivasi responden melakukan tindakan sosial pindah partai menjelang kompetisi pemilu legislatif. Analisa persepsi dan motivasi ini menjadi satu rangkaian penjelasan dalam kerangka teori Tindakan sosial Weberian.

Triangulasi atau konfirmasi silang informasi penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dilakukan melalui observasi terhadap keseharian responden. Observasi ini meliputi pengamatan peneliti pada pergaulan sosial keseharian responden di lingkungan partai politik dan menggali informasi tentang sejarah hubungan sosial responden dari orang-orang terdekatnya baik di partai yang lama maupun partai yang baru. Data observasi ini dideskripsikan sebagai profil dan biografi singkat setiap responden yang dilampirkan untuk memperkuat triangulasi data wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN TEORITIK

1. Hasil Penelitian

a. Pemahaman Para Nomadis Politik terhadap Partai Politik

Penyajian data penelitian pada bagian pertama ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana informan penelitian kami memahami atau memaknai partai politik. Data informasi ini digali melalui pertanyaan-pertanyaan awal atau pembuka dalam sesi wawancara yang secara garis besar meminta informan untuk mengingat kembali niat awal masuk partai politik dan bagaimana kemudian melalui pengalaman berpartai mereka membangun pemahaman tentang partai politik.

Sebagian informan semula menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat normatif bersumber dari yang mereka baca tentang partai politik seperti fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi politik pada masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengikuti pemilihan umum dan lain sebagainya. Kedalaman jawaban baru didapatkan ketika peneliti mulai mengajukan pertanyaan lanjutan “Menurut pengalaman Bapak/Ibu apakah persis seperti itu?” Pertanyaan ini mendorong informan menjawab makna partai politik dalam pemahaman mereka yang lebih subjektif dan berdasarkan pengalaman pribadi.

Dari proses pengolahan data dan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara maka peneliti kemudian mengelompokkan jawaban informan dalam klasifikasi jawaban sebagaimana berikut ini:

- **Partai sebagai Saluran Aspirasi Politik**

Jawaban yang paling banyak muncul pada sesi awal wawancara ketika informan disodori pertanyaan tentang bagaimana mereka memahami partai politik, bahwa partai politik adalah saluran aspirasi masyarakat. Beberapa informan bahkan mau menjelaskan lebih jauh dan mendalam jawabannya berdasarkan pengalaman mereka. Informan SA yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebelum berkiprah di partai, misalnya menegaskan bahwa saluran partai politik lebih didengarkan daripada ketika masyarakat berbicara langsung pada birokrasi tentang usulan pembangunan atau pembenahan di lingkungan sekitarnya.

“Lama Mas, usulan perbaikan jalan, pembenahan saluran kalo warga yang ngomong ke Dinas atau ke Desa (Kantor Desa), semuanya sekedar ditampung”. Pernyataan yang diungkapkan oleh informan Amin ini senada dengan jawaban informan SW, sorang aktivis sosial yang banyak mengorganisir kegiatan perempuan di pedesaan. “Partai lebih lebih cepet Mas, karena mereka kan punya anggota DPRD, nek sing nelpon anggota DPRD wes langsung beres Birokrasine”. Dua jawaban ini jelas didasarkan pada pengalaman pribadi para informan bukan berasal dari buku-buku teori politik yang normatif. Bila diperhatikan definisi dari aspirasi yang dimaksud dalam jawaban mereka juga bersifat praktis dan merujuk pada layanan public atau kehadiran pemerintah dalam membantu menangani persoalan-persoalan keseharian masyarakat.

Informan IA juga beranggapan bahwa partai politik juga dapat bermakna sebagai saluran politik yang efektif. “Partai yang baik itu adalah partai yang tanggap pada aspirasi masyarakat Mas, dan mampu mengelola aspirasi tersebut menjadi misi atau target kerja, dan bila terwujud juga harus diklaim sebagai keberhasilan kinerja politik partai agar nantinya bisa dikapitalisasi jadi suara”. Pemahaman para informan terhadap partai politik sebagai saluran aspirasi masyarakat ini juga memiliki logika politik rasional seperti dapat kita analisa dari jawaban informan IA. Partai politik memiliki *privilege* dalam berhadapan dengan birokrasi dan pemerintahan sehingga dapat “mendekatkan” jarak antara birokrasi dengan masyarakat. Dalam kerja-kerja penyampaian aspirasi inilah capital politik bisa diraih oleh partai yang pada akhirnya adapt dimanfaatkan oleh anggota partai yang maju sebagai caleg untuk menjadi modal sosial. Penilaian masyarakat terhadap kinerja partai yang baik terutama dalam menyampaikan aspirasi ini dapat menjadikan anggota partai dianggap sebagai tokoh masyarakat, status sosial yang penting bagi politisi.

Karakteristik jawaban “partai sebagai saluran aspirasi masyarakat” menjadi populer atau menjadi jawaban yang paling disebutkan oleh para informan karena memang dari catatan profil para informan, mereka semua adalah tokoh masyarakat di lingkungan sosial masing-masing. SA dan AA adalah anggota DPRD Kabupaten Malang inkumben yang tentu saja memiliki basis massa pendukung, sedangkan SW adalah tokoh perempuan di Kabupaten Malang yang sudah banyak dikenal melakukan pendampingan bagi program pemberdayaan perempuan di pedesaan. Informan IA adalah aktivis sosial yang rajin melakukan advokasi untuk permasalahan sosial pada kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Malang.

Sebagai tokoh masyarakat, mereka sering menjadi rujukan atau *opinion leader* dalam berbagai upaya penanganan masalah di lingkungan sosial seperti kerusakan jalan, saluran air, informasi bantuan pemerintah daerah, program sosial dan masalah infrastruktur lain. Mereka adalah jembatan atau perwakilan, dalam berbagai level, bagi suara masyarakat untuk berhubungan dengan kekuatan politik dan birokrasi pengambil keputusan di Kabupaten Malang. Dalam posisi seperti ini mudah dipahami mengapa mereka cenderung seragam dalam memaknai fungsi strategis partai politik sebagai saluran aspirasi masyarakat, karena mereka kerap kali terlibat dalam proses-proses politik penyaluran aspirasi semacam ini.

- **Partai Politik sebagai “Kendaraan” Politik**

Istilah atau konsep “kendaraan” dalam konteks penelitian ini didapatkan oleh peneliti dari diskusi di luar sesi wawancara dengan salah seorang informan yang kebetulan dapat ditemui pertama kali oleh peneliti. Informan IA dalam obrolan lepas setelah sesi wawancara mengungkapkan pada penulis kecenderungan pragmatis yang menghinggapi sebagian besar politisi di Kabupaten Malang. Dalam konteks ini dia menyebutkan “Politisi jaman saiki iki bedo karo ndhisik Mas, Partai hanya dianggap sebagai kendaraan politik, nek mbiyen kan jelas wong nasionalis pasti PDI, wong professional pengusaha yo Golkar, kyai – kyai ngelumpuk ndik PPP”.

Konsep “kendaraan” ini sepadan maknanya dengan alat untuk mencapai tujuan. Artinya politisi tertentu menganggap bahwa partai politik adalah alat untuk mencapai tujuan pribadi. Pada analisa lebih lanjut dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kendaraan ini untuk menandai jawaban wawancara yang memiliki kecenderungan pragmatis yaitu aktor memperhitungkan kesesuaian kriteria partai politik dengan tujuan pribadinya.

Hal ini misalnya tercermin dari jawaban-jawaban awal informan AA yang merupakan politisi kawakan anggota DPRD Kabupaten Malang inkumben dari dua partai berbeda. Sedari awal informan Andi memang berkeinginan berkarir di bidang politik dan dia masuk ke partai politik dengan kriteria yang mendukung karir politiknya. Dalam bahasa verbatim informan AA memaknai partai politik sebagai “partai politik itu bisa menjadi ajang untuk kita berbuat sesuatu lebih banyak bagi masyarakat Mas, tetapi harus ada imbal baliknya bagi kita, yaitu partai juga harus memberi kita peluang untuk mengembangkan diri”.

Kata “mengembangkan diri” di sini dapat dimaknai secara luas dari penjelasan lanjutan informan AA sebagai peluang untuk menduduki jabatan atau mendapatkan insentif ekonomi dari kegiatan dan aktivitas kepartaian. Pemikiran informan AA ini sejalan dengan informan IA yang menyatakan bahwa pemahaman awalnya pada partai politik dibangun dari pemahaman terhadap politik itu sendiri, yang penuh dengan berbagai intrik dan kepentingan. Dia mengungkapkan, “bila semua orang berpartai dengan niatan untuk mencapai tujuannya sendiri, maka sikap idealis dan ideologis akan menjadi tidak masuk akal”.

Kluster jawaban-jawaban dari sesi wawancara inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai kelompok pemahaman yang menganggap bahwa partai politik sebagai “kendaraan” untuk mencapai tujuan pribadi apapun definisi tujuannya baik ekonomi maupun status sosial. Pemahaman seperti ini terbangun dari pengalaman dan interaksi selama berkecimpung dalam kegiatan partai politik yang menghasilkan pemaknaan pragmatis yang pada akhirnya melahirkan sikap pragmatis pula dari aktor politik.

- **Partai Politik Sebagai Bagian dari Lingkungan Sosial**

Pemahaman lain yang muncul terhadap partai politik adalah pemahaman yang sangat bersifat sosiologis. Beberapa informan partai secara terang-terangan bahkan memahami partai politik sama seperti organisasi sosial masyarakat yang lain, yaitu sebagai sekumpulan individu manusia yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Pemahaman seperti ini misalnya muncul dari pernyataan informan Yuni yang memang aktif dalam berbagai kegiatan dan kepengurusan organisasi sosial masyarakat bahkan sejak muda pada zaman Orde Baru.

Dorongan untuk aktif dan bergabung dalam partai politik ternyata bisa sama sekali jauh dari motif politik. Informan SW menjelaskan bahwa keterlibatan dalam partai politik lebih banyak karena mengikuti arus lingkungan sosial dan pergaulan organisasinya. Dalam konteks pengalaman seperti ini pemahaman terhadap partai politik tidak ditentukan oleh pengertian tentang ideologi politik suatu partai, fungsi dan tugas partai atau visi-misinya tetapi lebih ditentukan oleh kecocokan dengan lingkungan sosial dan orang-orang yang tergabung lebih dulu dalam partai politik. “Sakjane semua partai iki podo Mas, organisasinya mirip dan kegiatannnya sama, sing penting ki orang-orangnya cocok apa ndak dengan kita”.

Berdasarkan pengalaman seperti ini maka pemahaman informan terhadap partai politik tidak terbangun berdasarkan aspek-aspek formal dan organisatoris partai tetapi lebih pada aspek humanis atau “guyub rukun” dan cepat tanggap ketika terjadi musibah, bencana alam atau apapun melalui kegiatan Bakti Sosial. Pemahaman ini merupakan dimensi yang sama sekali lain bila dibandingkan dengan kluster pemahaman lain yang sangat bersifat politis. Dalam hal ini hubungan antar personal

sangat menentukan. Oleh karena itulah penulis menyebut pemahaman ini sebagai pemahaman sosiologis.

Sebagaimana pemahaman partai politik yang berdiri dan hidup, berkembang dalam lingkup sosial masyarakat. Maka sewajarnya melihat partai politik bukan sebagai organisasi yang statis akan tetapi organisasi yang mampu memberikan harapan bagi individu di lingkungan sosial. Harapan ini meliputi, keterpenuhan hak-hak warga negara yang mungkin belum tersampaikan dan bahkan belum terwujud. Dengan demikian, partai politik layak dilihat sebagai organisme yang mampu bertindak berdasarkan tujuan dan kepentingannya dan hal tersebut melibatkan orang atau individu di dalamnya.

b. Motif Tindakan Berpindah Partai

Sajian data penelitian pada bagian ini didasarkan pada rumpun pertanyaan lanjutan dalam sesi wawancara. Data disusun berdasarkan jawaban informan pada pertanyaan tentang dorongan atau motifnya untuk memutuskan berpindah partai. Jawaban informan pada umumnya dalam rangkaian argument panjang lebar yang meliputi sejarah karir politik, latar belakang hubungan dengan partai terdahulu, maupun pertimbangan-pertimbangannya terkait dengan situasi kontemporer dan masa depan mereka sebagai politisi. Namun dalam penyajian data ini peneliti berusaha melakukan pengenalan kembali beberapa argumen kunci yang dapat diklasifikasikan sebagai motif tindakan berpindah partai.

• Dorongan Jabatan dan Status Sosial

Melalui analisa wawancara di lapangan, penulis menemukan motivasi berpindah partai yaitu dorongan insentif seperti jabatan, status sosial dan materil. Dorongan insentif tersebut, dianggap sebagai tujuan mendapatkan jabatan karena dengan menjabat akan mendapatkan legitimasi di masyarakat termasuk status sosial. Informan Andi misalnya menyatakan “Sakjane semua partai iki podo Mas, organisasinya mirip dan kegiatannnya sama, sing penting ki orang-orangnya cocok apa ndak dengan kita”. Bagi informan AA, status sosial menjadi penting karena secara tidak langsung memberikan keuntungan ditengah masyarakat. Selain itu, status sosial

dengan menjabat sebagai anggota dewan legislatif dapat berpengaruh terhadap pendapatan atau kekayaan.

Kemudian, berdasarkan telaah wawancara dilapangan juga memperlihatkan bahwa dorongan insentif dan jabatan ini menjadi satu tujuan antara untuk mengamankan tujuan lain yaitu status sosial dan ekonomi. Seperti dinyatakan oleh informan IA “posisi anggota DPRD ki paling ideal Mas kalo mau mengabdikan Partai, bisa bekerja mengabdikan pada masyarakat, menyalurkan aspirasi sekaligus dapur aman”. Secara primer motif materi ini lebih kepada kepentingan pribadi, dan sekunder lebih menekankan pada tujuan dan kepentingan untuk menjadi anggota dewan adalah atas dasar kepentingan masyarakat (Lihat lampiran 1 dan 3 poin 12-15). Jadi keterpilihan sebagai anggota DPRD dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melalui gaji dan pendapatan dan status sosial di masyarakat.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa perpindahan calon anggota legislatif adalah adanya dorongan motif material insentif berupa jabatan dan status sosial yang mereka anggap penting dalam melakukan perpindahan partai politik. Sedangkan status sosial dianggap penting karena dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dan hal ini dapat dijadikan sebagai manifestasi jangka panjang dalam kompetisi politik.

Profil dan biografi singkat AA sebagai salah satu politisi senior di Kabupaten Malang membuktikan, bahwa keberhasilannya menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Malang selama tiga periode, adalah berkat kepiawaiannya dalam mengelola sumberdaya politiknya. Dari berbagai keterangan yang didapatkan dari kolega di partai Golkar sebagai seorang politisi, informan AA memang dikenal sangat lincah dalam memanfaatkan program-program pemerintah sebagai bagian dari klaim kinerja politiknya di mata masyarakat daerah pemilihannya. Dalam kehidupan personalnya, dalam pengamatan pergaulan sehari-hari menurut peneliti, profil pribadi AA juga dikenal sebagai politisi yang “licin” dan gesit dalam menangkap peluang dan melakukan *political lobbying* untuk kepentingan politik pribadinya.

Informan IA juga dikenal memiliki profil yang mirip dengan AA, walaupun belum pernah menjabat sebagai anggota DPRD, ia dikenal dekat dengan semua kalangan politik dan berbagai latar belakang partai. Informan IA juga dikabarkan tidak nyaman dengan posisi dan peluang yang didapatkan selama di partai lamanya- Partai Demokrat, sehingga menjelang Pileg 2019, ia mulai terlihat mendekati beberapa aktor

politik terkemuka di Kabupaten Malang untuk kepentingan politiknya demi meningkatkan peluang keterpilihannya pada Pileg 2019.

- **Pengaruh Kedekatan Personal**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melihat bahwa motif calon anggota legislatif melakukan tindakan pindah partai didorong oleh motif kedekatan personal. Hubungan personal ini karena pada (lampiran 1, 2 dan 4) ditemukan jawaban bahwa perpindahan ke partai politik Nasdem dilakukan karena ajakan dan permintaan secara personal oleh figur elit Bupati Malang. Figur ini dianggap sebagai sosok yang mempunyai kharisma dan empati yang besar terhadap kondisi sosial dan bahkan secara personal menganggap sebagai keluarga. Permintaan dan ajakan inilah yang membuat calon anggota legislatif berpindah partai politik (lampiran 2, poin 20 dan 21).

Ketika ditanyakan alasan berpindah dari Partai Golkar ke Partai NasDem, informan SW menyatakan bahwa "Saya ditelpon oleh Bapak (Bupati Malang), untuk membantu Beliau di NasDem Mas, karena dulu saya berpartai juga karena hubungan dekat dengan Bapak, maka saya juga ndak keberatan". Dalam penjelasannya lebih lanjut, informan SW juga menyatakan bahwa kedekatan keluarga mereka dengan Bupati Malang sudah terjalin lama semenjak awal beliau masih meniti karir politiknya, jadi ada semacam nilai loyalitas yang melampaui kepentingan sosial atau ekonomi jangka pendek.

Kedekatan personal dan menjaga kelangsungan hubungan baik ini kemudian berlanjut hingga masa penjangkaran dan pendaftaran calon legislatif. Ketika ditanyakan mengenai motivasinya untuk maju dalam pileg 2019, informan SW menyatakan "lha yo podo wae Mas, saya itu ndak pernah berpikir jadi anggota DPRD atau jabatan lainnya, tapi begitu Bapak ngendikan agar saya mau maju untuk Dapil sini ya saya manut saja". Jawaban ini linier dan konsisten dengan motif dari informan SW berpindah partai. Secara konseptual, motif di balik tindakan tersebut tidak bisa dikenali sebagai motif politik, tetapi juga tidak bisa dijelaskan sebagai motif ideologis. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian pembahasan teoritik.

Jawaban informan SW tentang motivasinya berpindah partai politik konsisten dengan pemeriksaan informasi silang melalui proses *profiling* dan observasi yang

dilakukan oleh peneliti. Semenjak muda, aktivitas publik informan SW memang lebih banyak di area sosial daripada politik. Pileg 2019 adalah pengalaman pertama informan SW mencalonkan diri, sepanjang sejarahnya, beliau lebih dikenal sebagai aktivis perempuan terutama dalam isu pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga dan perempuan di pedesaan. Aktivitas ini bahkan dijalannya semenjak masa Orde Baru. Walaupun sejak muda aktif di partai Golkar, namun dalam pandangan masyarakat Gedangan, informan SW justru tidak dikenal sebagai aktivis partai politik. Beliau lebih dikenal karena aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan yang seringkali membantu sosialisasi program-program sosial dan pembinaan serta pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Selain informan SW, informan SA juga mengakui bahwa faktor kedekatan personal juga menjadi salah satu pertimbangannya untuk melakukan pindah partai ke NasDem. Informan SA yang terlibat dalam faksionalisasi dan konflik internal dalam partai Golkar di Kabupaten Malang, merasa bahwa konflik tersebut dapat mempengaruhi proses pencalegannya pada periode selanjutnya. Berkat kedekatan personal dengan Bupati Rendra Kresna dan Choirul Anam, dua tokoh Golkar yang terlebih dahulu hijrah ke NasDem, informan SA akhirnya mempertimbangkan untuk pindah ke NasDem.

- **Ketertarikan *platform* kampanye dan Ideologi partai.**

Merujuk pada jawaban-jawaban terdahulu dari para informan dapat kita petakan bahwa secara garis besar motivasi dari perpindahan partai dalam dua kutub besar yaitu alasan politis yang sangat bersifat pragmatis dan sosiologis yang cenderung bahkan tidak berhubungan dengan kepentingan politik apapun. Dalam konteks ini, persoalan ideologis ternyata tidak menjadi topik yang dominan dalam ragam jawaban informan. Pengenalan corak ideologi partai perbedaan ideologi satu partai dengan partai yang lain juga tidak pernah mengapung dalam perbincangan dalam sesi wawancara. Jawaban dengan motif kepentingan politis juga sangat mengerucut pada kepentingan politik yang sangat pragmatis yaitu memperhitungkan kapasitas partai yang dapat mendukung tingkat keterpilihan individual informan dalam system perhitungan suara *saint league*.

Namun setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata dua kutub jawaban politik pragmatis dan sosilogis ini ternyata masih memiliki varian lain ketika peneliti berusaha menggali lebih jauh persepsi informan terhadap partai yang ditinggalkan dan partai politik yang menjadi tujuan perpindahan. Ada beberapa aspek dari profil partai tujuan yang ternyata menarik bagi informan dan dipersepsikan sebagai hal positif yang juga diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan berpindah partai politik. Informan IA misalnya menyatakan bahwa “Partai NasDem kampanye medianya Mas, jadi Restorasi Indonesia dan Politik tanpa Mahar ini cukup ngena juga bagi caleg-caleg seperti kami untuk mempertimbangkan masuk NasDem”. Hal ini mirip juga dengan ungkapan informan SA yang menyatakan “Politik tanpa mahar iki menarik Mas, jelas hal baru yang memberi harapan bagi caleg terutama caleg daerah yang selama ini selalu terbentur perhitungan masalah biaya”.

Dalam sesi pendalaman informan SA bahkan menjelaskan bahwa selama ini orang selalu berpikir bahwa menjadi caleg hanya permasalahan modal uang semata dan ketika terpilih, tujuan utama para anggota legislatif ini hanya secepat mungkin mengembalikan modal uang yang mereka keluarkan selama menjadi caleg. Ungkapan ini kemudian dijelaskan informan SA dalam konteks pandangan pribadinya “Sebenarnya Caleg iki yo wedi Mas dengan ancaman kasus korupsi, jadi kalo ada partai yang bisa memfasilitasi kami bisa bekerja dengan nyaman tanpa harus dikejar-kejar target yang akhirnya berakhir dengan korupsi ya kami malah senang sekali, jadi menurut saya politik tanpa mahar itu ya seperti itu”. NasDem sebagai partai tujuan dari perpindahan para anggota legislatif dianggap memiliki keunggulan dari platform tersebut, dan memiliki kesesuaian dengan kehendak dan pemikiran para caleg ini.

Berdasarkan informasi dari data biografi dan profil informan SA, rekam jejaknya sebagai petani dan aktivis organisasi petani turut membentuk modal sosialnya dalam mengarungi dunia politik. Informan SA memiliki ikatan kuat dengan kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah barat Kabupaten Malang. Kelompok tani ini merupakan basis dukungan utama bagi informan SA sehingga ikatannya dengan partai politik lebih longgar karena beliau memiliki “keleluasaan” untuk melakukan *bargaining* dengan partai dalam proses pencalegan.

Informan IA, dalam sesi wawancara menunjukkan kedalaman pemahaman teoritisnya tentang platform dan ideologi partai. Hal itu turut membentuk persepsinya

terhadap partai politik yang bertipe dikotomis *das sein* dan *das sollen* yang bertumpu pada anggapan bahwa partai pada praktik senyatanya tidak lagi sesuai dengan perumusan idealnya.

2. Pembahasan Teoritik

a. Hasil Interview dalam Kerangka Teori Tindakan Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindakan pindah partai politik dalam kerangka teori tindakan sosial Weberian. Sebagai suatu tindakan sosial, tindakan berpindah partai memenuhi kriteria definisi dalam prosesnya sebagai suatu tindakan yang mempertimbangkan keberadaan orang lain. Pemahaman terhadap tindakan pindah partai didapatkan melalui analisa terhadap pemahaman terhadap partai politik sebagai landasan awal pembentuk motivasi berpindah partai.

Dalam klasifikasi Weber, motifasi tindakan sosial dibagi menjadi empat yaitu tradisional, afektif-emosional, rasional berorientasi nilai dan rasional instrumental. Dari analisa data wawancara keseluruhan informan, motivasi tindakan afektif tampak dari penjelasan informan SW yang mengedepankan alasan kedekatan hubungan personal. Sedangkan tindakan rasional berorientasi nilai didapatkan dari penjelasan informan SA yang berpindah partai dengan alasan mencari partai yang lebih bisa memberi ruang aktualisasi dirinya. Tindakan rasional instrumental dapat diidentifikasi dari hasil wawancara dengan informan AA dan IA yang menyatakan bahwa tujuan untuk berpindah partai politik sangat dilandasi oleh kepentingan untuk mencapai tujuan keterpilihannya dalam pileg 2019. Jadi tindakan sosial berpindah partai bukan merupakan tujuan akhir tetapi lebih merupakan instrumen atau alat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Poin klasifikasi Weber yang tidak dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah motifasi tradisional dalam tindakan sosial.

Melalui analisa wawancara di lapangan, penulis menemukan motivasi dari empat informan calon anggota legislatif melakukan pindah partai. Motif ini didasarkan atas tiga faktor pendorong yang di kategorikan oleh Alan Ware yaitu motif berdasarkan pada *material incentive* meliputi dorongan materi seperti jabatan, status, kekayaan. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa motivasi untuk berpindah partai yaitu salah satunya adalah mendapatkan jabatan di kursi legislatif. Mereka menganggap bahwa tujuan untuk ikut dalam pemilihan umum dan menang adalah meraih jabatan karena

dengan menjabat akan mendapatkan legitimasi dimasyarakat termasuk status sosial. Bagi informan status sosial menjadi penting karena secara tidak langsung memberikan keuntungan ditengah masyarakat.

Selain itu, status sosial dengan menjabat sebagai anggota dewan legislatif berpengaruh terhadap pendapatan atau kekayaan. Dengan begitu, motif material insentif ini lebih menekankan pada rasio dalam pemilihan partai politik sebagai kendaraan politik. Maka, secara independen para calon anggota legislatif dapat berpindah setiap saat. Temuan dilapangan juga memperlihatkan bahwa dorongan materi menjadi satu tujuan primer dan sekunder. Secara primer motif materi ini lebih kepada kepentingan pribadi, dan sekunder lebih menekankan pada tujuan dan kepentingan untuk menjadi anggota dewan adalah atas dasar kepentingan masyarakat (lampiran 2, 3, 4).

Motif berdasarkan *solidarity incentive* yaitu rasa kesatuan, solidaritas partai dan solidaritas individu. Pada aspek motif insentif solidaritas juga ditemukan di beberapa informan yang menyebutkan bahwa untuk berpindah partai mereka melihat dahulu pada solidaritas individu yang kemudian rasa kesatuan yang dimiliki ketika pernah bersama berjuang dalam satu partai politik. Hal ini diidentifikasi dari kedekatan secara personal baik itu dari sosok figur elit maupun sosok individu yang berpengaruh di partai tingkat lokal. Menurut informan, rasa kesatuan didapatkan dari latar belakang partai yang sama dan memiliki visi serta tujuan sama dianggap sama secara ideologis. Maka dari itu, motif berganti partai melalui dorongan solidaritas dan rasa kesatuan berperan dalam menentukan sikap dan keputusan untuk ikut berpindah partai sesuai dengan dorongan rasa kesatuan maupun solidaritas yang dimiliki antar individu calon legisltaif dengan individu yang dianggap menguntungkan dan dapat mengantarkan tujuan politik mereka (lampiran 1, 2, 4).

Motif berdasarkan pada *purposive incentive* antara lain adalah dorongan tujuan, keyakinan ideologi dan pengaruh partai. Berkaitan dengan itu, motif untuk berpindah partai yang dilakukan oleh informan calon anggota legislatif juga didasarkan oleh dorongan tujuan yang mereka anggap sama dalam kepentingan politik. Kepentingan politik ini yaitu melalui kesamaan ideologi. Ideologi bagi calon anggota legislatif yang berpindah partai sangatlah penting dalam proses penentuan keputusan berpindah partai politik atau tidak. Keputusan ini bisa didapatkan dari pengaruh partai

yang dianggap mumpuni untuk membawa ke kursi dewan legislatif. Apabila melihat pada rujukan pertanyaan tentang ideologi dan visi-misi partai politik, sebagian informan memandang bahwa ideologi adalah satu-satunya platform yang harus ada di tubuh partai, tanpa platform ideologis mereka beranggapan bahwa partai politik tersebut tidak memiliki pendirian yang jelas dan dapat dipastikan akan mengarah pada ketidakjelasan pengelolaan partai, banyak penyimpangan kekuasaan dan kental akan unsur *money politic* (lampiran 1,3,4).

b. Analisa Hubungan antara Pemahaman terhadap Partai Politik dengan Motif Perpindahan Partai politik

Penggalan data dalam penelitian ini difokuskan dalam menjawab dua pertanyaan utama yaitu berkait dengan pemahaman informan terhadap partai politik berlanjut kemudian pada motif tindakan pindah partai politik yang dilakukan oleh informan. Penyusunan rumusan masalah ini tentu saja didasari oleh asumsi awal bahwa terdapat hubungan antara pemahaman informan terhadap partai politik dengan motif yang mendorong informan untuk berpindah partai politik. Dalam sesi wawancara, peneliti berupaya menggali jawaban pemahaman terhadap partai politik ini dalam konteks dinamis berdasarkan pengalaman para informan di lapangan selama beraktivitas dalam partai politik, tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat teoritik seperti tugas dan fungsi pokok partai politik dan lain sebagainya.

Analisa ini sesuai dengan *verstehen* (*empathatic understanding*) yang diperkenalkan oleh Max Weber dalam memahami tindakan sosial. Tindakan pindah partai yang dilakukan oleh beberapa aktor politik di Kabupaten Malang ini memiliki motivasi dan latar belakang yang berbeda. Kedalaman upaya pemahaman dan empati dalam penelitian ini diaplikasikan dalam perumusan dua masalah penelitian yang bertujuan untuk menggali pemikiran subjek penelitian terkait tindakan berpindah partai.

Berdasarkan analisa jawaban dari para informan yang telah dikelompokkan dalam kerangka model motivasi pindah partai yang dirumuskan oleh Alan Ware, didapatkan konsistensi hubungan antara pemahaman terhadap partai dengan motivasi tindakan pindah partai yang dilakukan oleh informan. Garis lurus konsistensi ini dapat

dirunut melalui analisa terhadap jawaban informan pada pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua dalam rumusan masalah.

Hubungan kuat pertama adalah pada jawaban pemahaman partai sebagai “kendaraan” politik bagi informan. Seperti yang dijelaskan dalam bagian awal penyajian data, konsep “kendaraan” merujuk pada alat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini didapatkan pengertian bahwa aktivitas politik kepartaian para informan sangat didasarkan pada pencapaian-pencapaian individual, misalnya motivasi untuk mendapatkan status sosial maupun ekonomi melalui keanggotaan dalam partai politik. Tindakan berpindah partai kemudian dapat dirasionalkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan logika bahwa partai lama tidak lagi dapat berfungsi sebagai “kendaraan” bagi informan untuk mencapai tujuannya, sehingga menciptakan kebutuhan untuk berpindah partai. Rumusan logika ini tampak jelas pada perhitungan maju sebagai caleg dan pertimbangan perbandingan peluang keterpilihan dari partai lama dengan partai baru, terutama berkaitan dengan sistem perhitungan *Saint League*.

Hubungan kuat yang kedua adalah pemahaman sosiologis terhadap partai politik yang dapat dimaknai sebagai kumpulan individu yang beraktivitas bersama-sama dalam suatu ruang sosial organisasi masyarakat. Informan dengan pemahaman politik seperti ini justru bersikap berbanding terbalik dengan informan yang memahami partai politik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemahaman sosiologis terhadap partai politik justru menjadikan faktor hubungan interpersonal/ antar individu dan kesetiaan kelompok menjadi faktor yang sangat penting sebagai rujukan untuk beraktivitas dalam partai politik.

Motivasi untuk berpindah partai sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, konsisten dengan pemahaman terhadap partai politik tersebut. Pada kasus ini, informan merasa tidak lagi cocok bergaul atau bersosialisasi dengan individu-individu dari partainya yang lama atau karena individu yang menjadi rujukan dalam berpartai telah pindah ke partai lain sehingga dia memilih untuk mengikuti jejak individu rujukan tersebut. Dalam konteks ini motif berpindah partai bukanlah hal yang bersifat rumit atau sangat penuh perhitungan, tetapi lebih merupakan tindakan yang bersifat otomatis karena hubungan interpersonal bersifat informal yang melampaui hubungan formal organisasi. Satu lagi poin konsistensi lain adalah ketika maju sebagai caleg,

keterpilihan juga merupakan hal yang utama melampaui upaya menjaga hubungan baik antar personal dengan elite partai seperti yang dijelaskan di awal tersebut.

c. Perpaduan Motif Perpindahan Partai

Berdasarkan analisa hubungan antara pemahaman partai politik dan motivasi berpindah partai politik diatas peneliti menemukan bahwa keempat informan memiliki lebih dari satu macam dorongan atau preferensi pertimbangan untuk berpindah partai. Temuan ini dirumuskan dalam kerangka *push and pull factors* dalam tindakan sosial berpindah partai. Faktor pendorong disini dipahami sebagai dasar yang lebih dahulu eksis di benak para informan jauh sebelum dirinya memutuskan untuk berpindah partai yaitu pemahaman terhadap partai politik itu sendiri.

Baik pemahaman partai politik secara politis demi kepentingan pribadi maupun secara sosiologis sebagai ruang sosial untuk berhubungan baik dengan orang lain atau mengaktualisasikan diri sama-sama memiliki dorongan yang sepadan untuk ditempatkan sebagai konstruksi awal para informan untuk berpindah partai di masa depan. Pemahaman partai sebagai sarana, alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan jelas memberikan logika yang kuat bagi informan untuk berpindah partai ketika partai yang lama dianggap sudah tidak lagi dapat merepresentasikan kepentingannya (*push factor*). Faktor penariknya (*pull factor*) adalah proses selektif untuk memilih partai baru yang diperhitungkan mampu menjamin kesinambungan kepentingan informan sebagai aktor politik.

Pada pemahaman sosiologis, pemahaman terhadap partai politik sangat jelas tidak terikat pada atribut partai politik tersebut, entah ideologi, organisasi atau visi misi partai politik, tetapi kecenderungan pemahaman partai politik sebagai hubungan sosial antar individu yang menjadi faktor ikatan informan dengan partai politik. *Pull factor* dari tindakan berpindah partai dari informan ini adalah individu yang menjadi referensi dan menjadi faktor pembentuk dari pemahaman partai politiknya sedari awal. Ketika individu tersebut berpindah partai maka hal itu menjadi faktor utama dari informan untuk turut serta berpindah partai.

D. Kesimpulan

Tindakan berpindah partai politik dalam kajian penelitian ini adalah suatu tindakan sosial seperti yang didefinisikan oleh Weber sebagai suatu tindakan yang mempertimbangkan keberadaan orang lain, secara subjektif. Dalam konteks kepentingan individu untuk memenuhi kepentingan dan tujuan politiknya, tindakan berpindah partai ini tetap berhitung keberadaan orang lain dalam konteks bagaimana orang-orang atau partai politik yang lama sudah tidak lagi relevan dengan tujuan subjek dan potensi dari partai baru untuk lebih memberikan bantuan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal individu secara sosial menjaga hubungan sosialnya dengan individu yang lain, tindakan berpindah partai tentu saja sangat erat dengan perhitungan keberadaan orang atau individu lain sebagai aktor sumber referensi sosial maupun politik bagi subjek penelitian.

Sebagai suatu tindakan sosial, tindakan berpindah partai politik melewati suatu proses dari tingkat *mind* berupa pemahaman dan pemikiran tentang partai politik itu sendiri yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan subjektif pelaku selama aktif mengikuti kegiatan partai politik. Pemahaman yang terbangun ini sangat berpengaruh dan berhubungan erat konsisten dengan motivasi melakukan tindakan berpindah partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Almond, Gabriel and Powell, B. 1966. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little Brown.
- Assidiqie, J. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grifindo Persada.
- Astrika, L. 2013. "Intensitas Perpindahan Keanggotaan Partai Politik: Sebuah Tinjauan Sikap Dan Norma Subyektif Anggota Partai." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 2: 83–97.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Craib, Ian. 1992. *Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantative and Mixmethode*. Third . California: SAGE Publications, Inc.
- Denayu, Swami V. 2017. *Perilaku Politik dan Kekuasaan Politik (Studi Perpindahan Partai Politik Basuki Tjahaya Purnama Dalam Perpolitikan Indonesia)*. Jakarta: Universitas Islam Hidayatullah.
- Efriza. 2019. "Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik." *Jurnal Politica* 10 (Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri): 2–25.
- Flynn, B. 1996. *Political Phylosophy at The Closure of Metaphisics*. Boston: Humanity Pers International Inc.
- Harahap, Rizki Rahman. 2014. *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten (Studi Pada Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak)*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Hidayat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Ikechukwu, U. G. 2015. "Political Nomadism and Its Implications on Political Development in Nigeria: A Critical Analysis." *International Journal of African and Asian Studies* 9.
- Koentjaraningrat. 1977. "Metode Wawancara." In *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Maxfield, N. F. 1930. "The Case Study." *Educational Research Bulletin* 9: 117–122.

- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Piliang, Yasraf Amir. 2005. *Transpolitika: Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Putra, Inra Reskia. 2017. *Analisis Perilaku Pindah Partai pada Anggota Partai Politik di Kab.Gowa Tahun 2014*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern, Terjemah Alimandan*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2001. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Sarirani, Esti. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Pindah Partai oleh Calon Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Wonogiri*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Scarrow, S. E. 2017. *The Changing Nature of Political Party Membership*. University of Houston: Department of Political Science.
- Stake, R. E. 2005. "Qualitative Case Studies." In *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. University of Illinois: Sage Publications.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Upe, A. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ware, Alan. 1999. *Political Partice and Party System*. New York: Oxford University Press.
- Wayemberg, M. 1992. *Political Phylosophy at the closure of Metaphisics: review essay*. London: Sage.
- Wirawan, I.B. 2013. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Artikel Internet

- Aminudin, M. 2018. *Golkar Pecat 2 Kadernya Di DPRD Malang Yang Loncat Partai*. diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4187868/golkar-pecat-2-kadernya-di-dprd-malang-yang-loncat-partai> (7 January 2020).
- Detik.com. 2019. *Ini Deretan Politikus Yang Pindah Partai, Puyuono Bakal Ikut?* diakses melalui https://news.detik.com/foto-news/d-3592145/ini-deretan-politikus-yang-pindah-partai-poyuono-bakal-menyusul/6#share_top (28 August 2019).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Tugas Dan Wewenang DPR*. diakses melalui <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> (25 January 2020).

- Ditjend Kemenkumham. 2015. *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif Dan Demokratis*. diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html> (25 January 2020).
- Harvey, L. 2012. *Social Action*. diakses melalui <https://www.qualityresearchinternational.com/socialresearch/socialaction.htm> (25 January 2020).
- Haryanto, A. 2018. *Mengenal Metode Sainte Lague Untuk Penghitungan Suara Di Pileg 2019*. diakses melalui <https://tirto.id/mengenal-metode-sainte-lague-untuk-penghitungan-suara-di-pileg-2019-cSN1> (7 January 2020).
- Jawapos. 2018. *Banyak Caleg Kutu Loncat, Lipi Sebut Partai Mirip Event Organizer*. diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/07/2018/banyak-caleg-kutu-loncat-lipi-sebut-partai-mirip-event-organizer/> (30 August 2019).
- Jpnn.com. 2019. *19 Politisi Senayan Pindah Partai Ini Daftarnya*. diakses melalui <https://www.jpnn.com/news/19-politisi-senayan-pindah-partai-ini-daftarnya?page=5> (15 January 2019).
- Kompas.com. 2019. *Perludem Ungkap Sejumlah Alasan Perpindahan Kader Partai Jelang Pemilu*. diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/21/14275241/perludem-ungkap-sejumlah-alasan-perpindahan-kader-partai-jelang-pemilu> (14 January 2019).
- Nana, D. 2018. *Rebut 50 Kursi DPRD Kabupaten Malang, 612 Caleg Siap Tempur Habis-Habisan*. diakses melalui <https://www.malangtimes.com/baca/31471/20180921/102900/rebut-50-kursi-dprd-kabupaten-malang-612-caleg-siap-tempur-habis-habisan> (7 January 2020).
- Rosen, David. 2013. *The 6 Political Personality Types*. diakses melalui <https://www.campaignsandelections.com/> (26 Agustus 2019).
- Studbaker, Benjamin. 2016. *The 16 Types Of Politician*. diakses melalui <https://benjaminstudebaker.com/2016/11/24/the-16-types-of-politicians/> (26 Agustus 2019).

DAFTAR LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Profil dan Biografi Informan 1 (AA)

Informan AA adalah seorang anggota DPRD serta seorang penasehat hukum (*lawyer*). Saat ini lebih aktif sebagai Anggota DPRD daripada berpraktek sebagai seorang penasehat hukum. Dikenal sebagai Politisi yang vokal dan banyak mengkritik kinerja pemerintah pada saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Malang. Berdomisili di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Narasumber AA lahir di Malang pada tahun 1965, berusia 53 tahun pada saat penelitian ini berlangsung. Pendidikan Narasumber di tempuh di SD Negeri 1 Pakisaji, SMP Negeri 6 Malang dan SMA Islam Kota Malang. AA menamatkan pendidikan sarjana di bidang Hukum pada Universitas Merdeka Malang pada tahun 1990 (gelar SH.) dan pendidikan pascasarjana di bidang Hukum pada tahun 2004 (gelar M.Hum) pada universitas yang sama. Narasumber AA juga pernah mengikuti Diklat Lemhanas pada tahun 2012.

Pada saat masih aktif di Partai Golkar, narasumber AA menduduki jabatan yang cukup strategis yaitu sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Malang. Narasumber AA masuk ke partai politik yaitu Partai Golkar pada tahun 2003 dan mengikuti kontestasi sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2004 tapi tidak terpilih. Pada tahun 2009, narasumber AA mengikuti Pemilu Legislatif dan berhasil duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar. Pada Pileg 2014, AA berhasil mempertahankan kursinya dan menjalani periode kedua keanggotaannya di DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi yang sama; Fraksi Golkar. Pada Pemilu Legislatif 2019, satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018, secara mengejutkan AA menyatakan diri keluar dari Partai Golkar untuk kemudian diketahui kembali maju sebagai calon legislatif untuk kursi DPRD Kabupaten Malang dari Partai NasDem.

Sejak aktif di Partai Golkar, AA dikenal memiliki kedekatan dengan RK yang merupakan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur. RK adalah Bupati Malang yang juga berpindah dari Partai Golkar ke Partai NasDem. AA memiliki kedekatan dengan RK yang dulunya menjabat sebagai ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Malang dan

AA menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Malang. Pada saat RK menjabat Ketua DPC Partai Golkar, AA ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar Kabupaten Malang. AA maju dan terpilih sebagai Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif tahun 2009 dan tahun 2014 dari Partai Golkar, di wilayah Dapil 4 (Kalipare, Kromengan, Ngajum, Wonosari, Pakisaji, Sumberpucung, dan Wonosari).

Narasumber AA dikenal sebagai politisi yang tajam dalam mengkritisi kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Narasumber AA juga adalah seorang politisi yang pandai dalam memanfaatkan pelbagai peluang dan mendapatkan berbagai program untuk masyarakat di wilayah daerah pemilihannya. “Narasumber AA lihai dalam memanfaatkan berbagai potensi untuk mencapai kepentingan yang diharapkan”, papar Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Malang yang sudah lama mengenal AA di Partai Golkar. Narasumber AA dikenal sebagai “orang dekat” figur Bupati Malang pada saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Malang.

Pada saat maju sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2019, narasumber AA maju melalui Partai NasDem dengan Nomor Urut 1. Nomor urut yang dianggap cukup strategis, karena memudahkan kader mensosialisaikan nama Calon Anggota Legislatif di surat suara karena posisinya yang berada di urutan paling atas dari kolom nama Calon Anggota Legislatif. Hal tersebut, menguntungkan narasumber AA, yang pada saat itu tidak lagi bersaing dengan kandidat Calon Anggota Legislatif *incumbent* dari Partai NasDem, karena yang bersangkutan berurusan dengan persoalan hukum dan mendapatkan surat pemecatan dari DPP Partai NasDem. Incumbent Partai NasDem sempat hendak mendaftarkan istrinya untuk mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif, tapi di akhir waktu, yang bersangkutan mencabut form pendaftaran.

LAMPIRAN 2

Transkrip wawancara Informan 1 (AA)

Tanggal Wawancara : 26 Januari 2020
Tempat/ waktu : Rumah Bapak. AA

Identitas Informan:

Nama : AA
Umur : 54 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister Hukum
Pekerjaan : Lawyer/ Anggota DPRD

1. A : selamat sore pak, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait penelitian tesis saya. Topic saya terrkait tindakan sosial berpindah partai politik.
2. A : kalau boleh tahu nama lengkap dan pendidikan terakhir pak?
B : nama saya AA, umur 54 tahun. Background pendidikan saya magister hukum dan saat ini profesi saya Lawyer
3. A : Untuk posisi atau pekerjaan saat ini?
B : saya menjabat sebagai anggota legislatif di kab. Malang dapil 4, komisi 4 pendidikan dan kesejahteraan masyarakat
4. A : Sejak kapan masuk ke dunia politik pak?
B : saya masuk ke partai politik yaitu Golkar tahun 2003 dan ikut kompetisi calon legislative tahun 2004 tapi kalah, dan pada tahun 2009 saya ikut menang dan saya menjabat dua periode. Dan saat ini saya menjabat sebagai anggota dewan di DPRD kab, Malang dengan kompetisi pemilu legislatif tahun 2019 kemarin.
5. A : Menurut bapak, apasih tujuan dibentuknya partai politik itu?
B : partai politik itu adalah sebuah wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi atau suara masyarakat. Selain itu partai politik adalah alat atau kendaraan bagi calon

anggota dewan atau anggota legislative yang ingin meraih kursi di DPRD baik kota/kabupaten ataupun DPR RI.

6. A : kemudian terkait tujuan dibentuknya partai politik apa sih pak?

B : partai politik itu mempunyai beberapa fungsi dan tugas pokok (tupoksi) yaitu fungsi, partai politik mempunyai fungsi yang sentral bagi demokrasi seperti di Indonesia seperti saat ini mas. Fungsi tersebut terkait dengan kepentingan seorang calon atau elit politik, sehingga dalam hal ini fungsi sebagai wadah aspirasi dapat tersampaikan karena nantinya calon anggota legislatif yang duduk di kursi akan membawa suara mereka. Jadi, fungsi partai politik bukan hanya sebagai wadah/penampung suara tetapi juga sebagai jembatan suara rakyat untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi sebagai input dalam proses legislasi. Sedangkan tugasnya untuk mendeseiminasi aspirasi yang sudah berbentuk legislasi untuk di implementasikan ke masyarakat.

7. A : Menurut bapak. Apakah Partai Politik penting dalam iklim demokrasi saat ini?

B : Penting dan masih dibutuhkan mas. Jadi, partai politik ini tidak bisa di pisahkan dengan demokrasi, partai politik kan salah satu pilar demokrasi?. Untuk itu partai politik sangat penting dan sampai kapanpun tidak pernah bisa dihilangkan eksistensinya. Partai politik menurut saya menjadi normative artinya bisa dipandang formal dalam kelangsungan sistem demokratis. Sedangkan non formal adalah tidak dilihat sebagai aktualisasi politik semata namun hanya dilihat sebagai bagian dari materialisme yaitu status sosial, jabatan dan kekuasaan.

8. A : Dari keempat aspek berikut yaitu visi-misi, ideologi, figure elit, dan organisasional manakah yang paling penting dan berikan alasan bapak.

B : Melihat kondisi saat ini, bagi saya yang paling penting adalah Organisasionalnya mas. Mengapa karena saat ini secara organisasional partai politik tidaklah efektif karena di kelembagaan tidak terlalu diperhatikan. Persoalan tersebut dapat sampean lihat, misalnya tidak ada dan yang menjadi trend pengambilan calon atau pencalonan di ambil dari luar partai bukan dari internal yang sudah dikaderisasi. Padahal kaderisasi dari internal partai sangatlah penting, ya menjadi masalah organisasional karena seperti tidak mempercayai potensi yang ada dalam internal. Padahal fungsi penting calon sebetulnya ya dari internal yang dikaderisasi secara utuh sehingga secara ideologis kuat. Nah, sekarang ini terbalik. Ini pasti akan berdampak pada kredibilitas partai politik. Jelas itu mas.

9. A : Menurut Bapak, apakah dari keempat aspek tersebut dalam partai politik masih relevan untuk dilihat sebagai urgensi dalam perkembangan partai politik saat ini?

B : relevan-relevan saja asalkan keempat aspek yang mas. Sebutkan itu berjalan sesuai dengan apa yang di jalankan oleh partai politik. Dalam hal ini misalkan, figur elit sangat menentukan dalam politik nasional, figure politik akan sangat berpengaruh dalam konstataasi pemilihan umum. Bahkan ideologi partai-pun akan berfungsi dengan baik dan inherent dengan jalannya sistem kepartaian dan nantinya mungkin tidak akan partai politik akan mengambil lagi atau mencari calon dari luar kader politik yang akan dipasang dalam percaturan politik nasional maupun regional.

10. A : apabila saya dapat sedikit menyimpulkan dari penjelasan Bapak, proses kaderisasi dan pendidikan kader itu penting sehingga partai politik kembali pada marwahnya sebagaimana fungsi dan tugas pokok sebagai pilar demokrasi nggih pak? Lalu, menurut Bapak. Seperti apasih kalau boleh tau dinamika partai politik yang berkaitan dengan pencalonan, pengkaderan tersebut pak?

B : saat ini itu tidak seperti partai-partai politik generasi awal mas, hal ini saya rasakan dan melihat langsung. Misalkan, kalau dahulu partai dalam hal perekrutan itu benar-benar di lakukan dan hasilnya adalah kader yang ideologis. Lihat saja di beberapa tokoh nasional yang masih ada, sampean bisa melihat sendiri. Saya sampaikan begini karena saya mengalaminya sendiri. Bagi partai saat ini itu ideologi adalah elemen sekunder dan yang utama adalah popularitas atas kepentingan khususnya dalam kontestasi pemilu. Lihat saja, ada banyak partai bahwa partai yang sudah punya gigi di Indonesia ini “ibaratnya” malah merekrut orang-orang dari luar pengkaderan. Hal ini sungguh mengecewakan, berdasarkan itu, pada akhirnya yang terjadi adalah apa yang saya sebut sebelumnya bahwa partai politik menjadi normative. Bukan persoalan, bahwa partai harus ideologis, iya. Ideologis tapi dalam beberapa hal. Apabila melihat pencalonan diri dan itu mengambil dari orang luar partai, artinya partai tidak percaya dan kurang *pede* apa yang sudah partai miliki dan siapkan sebetulnya. Dan ujungnya adalah pragmatis untuk legitimasi suara saja dan keterwakilan di legislatif saja. Kan ini disayangkan, seharusnya partai politik bisa lebih kokoh dengan pencalonan dari kader sendiri tanpa ada embel-embel misalnya popularitas seorang arti, ya maaf saja.

11. A : Iya baik, kemudian pak, dari keempat aspek tersebut kalau boleh menilai saat ini dalam partai politik itu berapa persen pak?

B : kalau visi misi partai pasti ada ya, kalau ideologi saat ini 50:50 dengan figure elit. Maksudnya begini, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ideologi tidak terlalu penting sekarang, wong para aktornya saja melihatnya pragmatis dan materialistis kok, jelas itu. Ya kira-kira 50%lah untuk partai yang masih punya ideologis. Dan figure elit ya 50% lah berpengaruh terhadap penarikan suara. Sampean tahu, saya mencalonkan diri di Dapil saya ini, suara saya terbesar mas. Ada yang se partai dan se-dapil tapi ketika berhadapan dengan saya, mereka mundur. Mereka tahu apa dan track record saya di masyarakat. Masyarakat di dapil saya ini sudah tahu dan pinter kok mas.

12. A : kalau boleh tahu dalam artian masyarakat pintar itu bagaimana pak, bisa dijelaskan?

B : ya, pintar dalam artian tahu bahwa mana sih orang yang benar-bener turun lapangan dan tidak. Masyarakat juga tahu bahwa kebutuhanya untuk memberikan suara itu ada harganya, maka dari itu harga dan implementasi orang yang dipilihnya itu memang sungguh-sungguh ketika setelah jadi.

13. A : oh, ya baik Pak. Kemudian Pak, kalau untuk tata kelola kelembagaan kepartaian menurut Pak, AA gimana?, misalkan dalam organisasionalnya begitu.

B : partai saat ini itu lemah dalam pengkaderan mas, misalkan ini ya, saya bocorkan sedikit. Coba mas Tanya ke DPC atau DPW, Tanya tahu tidak fungsi dan tugas partai politik itu apa? Saya jamin 60-70% tidak ada yang bisa menjawab. Sekarang ini banyak orang-orang yang ada dalam organisasional hanya menginginkan materi saja, tugas dan fungsinya tidak pernah paham. Mana tahu mereka tentang partai politik. Sampean juga bisa lihat, main saja kesana, apa yang mereka lakukan hanya ngobrol, ngopi saja. Tidak ada urusan yang berkaitan dengan kepartaian. Maka dari itu, pendidikan kader itu sangat penting bukan hanya ditingkat organisasional atau para kader baru tapi untuk semua harus sama pandangan dan pengetahuan tentang partai politik itu. Untuk itu partai politik menjadi sebuah formalitas saja dalam pencalonan seorang calon anggota legislative. Hal ini sebetulnya juga dipengaruhi oleh sistem partai yang mengarah pada oligarki politik sebetulnya mas. Boleh kok sampean teliti itu kecenderungan saat ini siapa yang memimpin dan siapa yang akan menjadi pemimpin.

14. A : baik, menarik ini Pak. Kira-kira menurut bapak dengan latar belakang yang luar biasa dan pengetahuan yang matang terkait partai dan politik. Menurut Pak. AA, bagaimana padangan bapak, terkait perpindahan partai. ya bapak, kalau dilihat juga berpindah partai pak.

B : iya betul. Menurut saya ya tidak apa-apa dan itu halal, sah kok mas. Dalam dunia politik itu pindah partai mau berapa kali tetap sah. Nah dari pada sulit untuk mendapatkan ijin atau restu atau melanggar administrative mending cari jalan lain ketika partai politik lain dapat sama-sama menjunjung kepentingan kita. Nah persoalan ini juga tidak lepas dari sistem oligarki mas. Kalau mesin politik di tempat lain sulit dan ada sistem lain yang lebih OK, meskipun itu oligarki kenapa tidak, toh itu berkaitan dengan kepentingan keduanya.

15. A : baik pak. Selanjutnya, apasih pak yang mendorong Pak. AA untuk berpindah partai politik dari Golkar ke Nasdem itu? Termasuk alasan motivasi dan faktornya apa saja pak?

B : kalau alasan, apa ya mas, begini saya itu ikut partai manapun pasti saya menang. Ya, Sakjane semua partai iki podo Mas, organisasinya mirip dan kegiatannnya sama, sing penting ki orang-orangnya cocok apa ndak dengan kita. Wong faktanya begitu kok iyaan?!

16. A : baik. Kalau motivasi dan faktor berpindah partai pak?

B : sama seperti yang sudah saya sampaikan diatas mas. Dimanapun saya pasti menang. Wong partai politik itu bisa menjadi ajang untuk kita berbuat sesuatu lebih banyak bagi masyarakat Mas, tetapi harus ada imbal baliknya bagi kita, yaitu partai juga harus memberi kita peluang untuk mengembangkan diri.

17. A : untuk faktor nya pak, yang paling utama kira-kira apa yang melandasi bapak untuk pindah partai?

B : kalau faktor paling ya adalah *seseorang*

18. A : kalau boleh tahu seseorang itu siapa pak?

B : adalah pokoknya, ya salah satunya pak. RA

19. A : baik, Sebagai aktor dan praktisi pak, kira-kira perpindahan partai politik itu karena apa dan ketika apa pak?

B : itu soal momentum saja mas,

20. A : baik. Pak. AA, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dan dari beberapa sudah bisa menjawab untuk pertanyaan saya. Baik, terimakasih atas waktunya, kalau nanti ada yang kurang saya bisa Tanya lagi ya pak?

B : wah boleh mas, silahkan saya, by Phone saja tidak apa-apa.

LAMPIRAN 3

Profil Informan 2 (IA)

Narasumber IA berprofesi sebagai konsultan investasi dengan profil mantan komisioner KPU Kabupaten Malang di tahun 2003 sampai dengan 2009. Narasumber IA lahir pada tahun 1976 dan berusia 44 tahun ketika penelitian ini berlangsung. Beliau berdomisili di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Menempuh Pendidikan di MI Al Hikmah Tajinan, MTs Annur Bululawang dan MA Annur Bululawang. Saat ini narasumber menuturkan bahwa yang bersangkutan sedang menempuh Pendidikan Magister Hukum. Narasumber memiliki pengalaman organisasi sebagai Ketua GMNI Kabupaten Malang. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merupakan underbow dan berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang dibentuk dan dipimpin oleh Soekarno. Namun, hubungan antara PNI dengan GMNI secara resmi putus setelah rezim Orde Baru melaksanakan kebijakan fusi partai pada 1973, di mana PNI digabung dengan partai nasionalis lain ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Narasumber juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Malang. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara.

Pada tahun 2014 narasumber terjun menjadi anggota partai Demokrat dan maju dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2014 di Dapil 3 (Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Wajak dan Tajinan). Saat itu narasumber berhadapan dengan incumbent Anggota DPRD dari Partai Demokrat. Incumbent tidak mendapatkan nomor strategis saat itu, namun narasumber mendapatkan nomor urut 1. Baik incumbent maupun narasumber tidak berhasil mendapatkan kursi pada Dapil tersebut pada Pemilu Legislatif 2014.

Pada tahun 2019, narasumber maju sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem di Dapil yang sama. Narasumber mendapatkan nomor urut 5, nomor yang sama dengan nomor urut Partai NasDem saat Pemilu Legislatif 2019. Namun yang bersangkutan tidak berhasil mendapatkan kursi, karena berebut dengan incumbent dari Partai NasDem. Partai NasDem hanya berhasil meraih 1 kursi dari Dapil tersebut, dari 2 kursi yang ditargetkan DPD Partai NasDem Kabupaten Malang.

Narasumber memaparkan bahwa mendapat ajakan untuk masuk ke Partai NasDem dari RK. RK adalah Bupati Malang yang berpindah dari Partai Golkar ke Partai NasDem. IA mengenal RK saat beliau menjabat sebagai Bupati Malang dan IA menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Malang. Selain IA memiliki kedekatan dengan RK, narasumber IA juga dianggap memiliki kedekatan pula dengan figur KDP Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem. KDP merupakan Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang. KDP menjabat sebagai Ketua KNPI meneruskan kepengurusan dari DPD KNPI Kabupaten Malang periode narasumber IA.

IA memaparkan bahwa “Salah satu faktor yang mempengaruhi perpindahan Partai adalah faktor partai-nya dan faktor figur yang ada dalam Partai NasDem. Kalau faktor partai, ya karena partainya baru dan prospek untuk menang tinggi, apalagi ada banyak figur yang mumpuni disitu”. Narasumber juga menganggap bahwa ideologi Partai telah luntur saat ini. Ideologi saat ini hanya dianggap sebagai sebuah “papan nama”. Narasumber IA berpandangan bahwa Partai Politik secara fungsi dan integritas pilar demokrasi, sudah tergadaikan oleh politik uang. Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah puncak dari keterbukaan *money politic* menurut narasumber. Narasumber juga menyampaikan bahwa perebutan suara saat ini bukan karena kepentingan rakyat tapi cenderung pada kepentingan pribadi. Hal tersebut terjadi karena kecenderungan yang dipandang oleh masyarakat saat ini adalah jabatan, status sosial dan kekayaan.

LAMPIRAN 4

Transkrip wawancara Informan 2 (IA)

Tanggal Wawancara : 20 Januari 2020
Tempat/ Waktu : Kopitiam, Kota Malang

Identitas Informan:

Nama : IA
Umur : 44 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister Hukum
Pekerjaan : Konsultan Investasi

1. A : Selamat Sore pak. IA, saya ingin menanyakan beberapa kuesioner terkait tesis saya perpindahan calon anggota legislatif pindah partai pak.

B : boleh mas, silahkan

2. A : Kalau boleh tahu nama lengkap, pekerjaan dan background pendidikan pak.

B : Nama saya IA, saya lulusan magister hukum, saat ini masih menempuh pascasarjana dan saya dulu bekerja sebagai anggota komisioner KPU. Saat ini kesibukan saya sebagai konsultan investasi.

3. A : dalam ranah politik termasuk aktif dalam politik sejak kapan pak. Kalau boleh tau?

B : sebetulnya saya itu tertarik dalam politik itu sejak saya menjadi mahasiswa, saya dulu aktif di berbagai kegiatan kampus dan hal tersebut membuat saya jauh lebih dalam memahami politik itu sebenarnya.

4. A : saya sempat melihat biografi bapak, dulu menjabat di komisioner KPU nggih? Kapan itu kalau boleh tau jelasnya?

B : iya betul, saya dulu menjabat sebagai komisioner di KPU di tahun 2003 sampai dengan 2009, dan setelah itu saya mulai menata dunia baru dan terlibat di beberapa kegiatan politik, tepatnya pada tahun 2014 saya terjun menjadi anggota partai Demokrat.

5. A : iya, pak. Kan ada rentan beberapa tahun sebelum benar-benar berkecimpung dalam politik dengan masuk partai democrat. Kira-kira waktu itu alasan mendasar untuk terjun ke politik melalui partai democrat apa pak?

B : dulu itu ketika menjabat sebagai komisioner KPU saya melihat bahwa dunia politik kok menarik dan saya melihat pada waktu itu dinamika yang berkembang khususnya dalam politik lokal sangatlah dinamis dan menantang. Oleh Karen itu saya banyak belajar dari teman-teman yang sudah banyak berkecimpung dalam politik, ya sebagai bahan belajar saja.

6. A : Baik pak. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pengetahuan politik pak Menurut Pak. IA, partai politik itu apa sih atau partai politik itu seperti Apa menurut pandangan pak. Isa?

B : bagi saya partai politik itu adalah suatu kelembagaan atau organisasi yang fungsinya sebagai alat atau kendaraan politik yang mana partai ini nantinya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan atau wadah aspirasi yang nantinya, secara fungsi diteruskan untuk menjadi masukan kebijakan pemerintah melalui para anggota dewan ini. Kalau dilihat secara fungsional kan partai ini adalah lembaga politik yang paling dekat dengan rakyat mas. Akan tetapi, selama saya *wira-wiri* belajar dari kolega yang sudah dahulu terjun ke politik, saya melihat ada fungsi-fungsi yang tidak terlihat ketika partai politik khususnya dalam pemilihan umum misalnya. Keanehan itu terlihat bahwa partai politik tidak sekuat ideologis-nya seperti partai politik jaman dahulu. Setelah masa reformasi dan selebrasi demokrasi partai politik menjadi tidak terarah. Hal ini dapat dibuktikan ketika partai politik krisis aktor atau elit atau kader untuk meneruskan partai politik. Yang terlihat dimata saya waktu itu adalah banyaknya *money politik*, meskipun *money politik* itu tidak dapat dihindari. Sejak tahun 2009 saya sudah merasakan bahwa partai politik tidak lagi ideologis dan cenderung melihat materi saja, perebutan suara bukan karena kepentingan rakyat tapi kepentingan pribadi. Namun, hal ini juga tidak salah karena tujuan salah satunya ya itu mas. Kan, yang dilihat di masyarakat kita ini adalah jabatan, status sosial dan kekayaan. Kalau sampean melihat bagaimana? Saya yakin itu benar, iya kan?

7. A : Nggih pak, betul-betul. Oh iya pak, berkaitan dengan ideologi partai tadi yang disampaikan, kira-kira saat ini partai politik secara ideologis itu bagaimana pak, bisa dijelaskan lebih dalam?

B : Bagi saya sekarang ini partai politik tidak ada yang benar-benar ideologis. Kenapa?, ya karena secara fungsi dan integritas pilar demokrasi sudah tergadaikan oleh politik uang tadi. Tahun 2009 itu adalah puncaknya jika saya melihat, bahwa ideologi dalam partai politik hanya sebuah papan nama saja. Tidak ada partai politik yang saat ini benar-benar ideologis.

8. A : kalau dinamikanya begitu, menurut Pak. IA, sebetulnya partai politik dibentuk itu untuk apa sih pak? Dari fungsi dan tugas pokoknya dan juga apakah partai politik dalam demokrasi saat ini itu masih penting?

B : ya jawabanya seperti tadi mas, secara fungsi dan tugas pokoknya seharusnya bisa menjadi jembatan masyarakat ke pemerintah, karena wadah aspirasi mas. Tapi, seharusnya partai politik juga berfungsi dan berperan sebagai media edukasi politik masyarakat luas. Tidak sebatas pada kader politiknya. Kemudian, apa tadi?, oh ya tugas pokoknya selain menjadi sarana edukasi politik juga harus berperan sebagai jembatan yang mampu mentransformasi aspirasi masyarakat yang menjadi kepentingan para anggota partai misalnya untuk dijadikan sebagai kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Saat ini kan yang menonjol kan kepentingan pribadi Iyakan?. Malahan saat ini mengarah pada oligarki politik. Hal ini secara otomatis menahan kepentingan rakyat dan mendahulukan kepentingan pribadi.

B : Menurut saya ya, Partai yang baik itu adalah partai yang tanggap pada aspirasi masyarakat Mas, dan mampu mengelola aspirasi tersebut menjadi misi atau target kerja, dan bila terwujud juga harus diklaim sebagai keberhasilan kinerja politik partai agar nantinya bisa dikapitalisasi jadi suara.

9. A : pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan kelembagaan partai politik pak. Dari empat faktor berikut mana yang menurut anda penting dan paling penting yang mana pak, yaitu visi-misi, ideologi, figure elit dan organisasional?

B : kalau keempat aspek yang disebutkan ya semua penting, partai politik tanpa adanya visi misi yang seperti kendaraan tanpa tujuan, visi misi dalam organisasional kan untuk membatasi dan mencapai tujuannya seperti apa maka dari itu visi dan misi itu penting. Lalu, ideologi saya kira ini penting untuk menghasilkan kader politik internal yang solid dan berintegritas tinggi terhadap partai. kemudian, figure elit ini adalah panutan istilahnya, sangat penting sekali, karena partai politik tidak memiliki figure elit yang menjadi panutan yang susah, tidak ada yang dijadikan rujukan kemana partai politik tersebut akan berhenti. Istilah-nya figure elit itu adalah barometernya, semua orang, atau kader internal partai pun untuk ikut serta dalam partai politik ya yang dilihat pertama kali sosok yang di depan, apabila figure ini bagus maka kesempatan besar pasti terlihat jelas dan dapat diprediksi akan kemana partai politik yang dipimpinnya tersebut. Secara organisasional penting, karena agar penataan dan pengelolaan partai lebih transparan apabila secara organisasional tidak baik yang tidak lama partai politik itu akan tumbang. Kira-kira yang paling penting saat ini, kalau saya melihat adalah ideologi partai yang perlu dibenahi dan kuatkan lagi. Siapapun pemimpinnya jika elit ataupun organisasionalnya rapuh percuma yang ada nanti mereka dalam partai politiknya akan berkompetisi satu sama lain dan kecenderunganya akan saling pukul.

10. A : saat ini fenomena tentang pindah partai banyak pak, dan setahu saya Pak. IA juga berpindah partai dari Demokrat ke Nasdem pak. Kira-kira bagaimana tanggapa bapak terkait perpindahan partai politik tersebut?

B : bagi saya pindah partai dalam dunia politik itu biasa saja mas. Orang terjun ke partai politik selalu punya alasan dan rasionalitas melihat peluang. Untuk itu,

tidak menjadi masalah, meskipun ada yang mengatakan kutu loncat atau apapun, karena mereka tidak mengalami dan mempunyai tujuan seperti saya dan orang lain yang melakukan pindah partai politik. Dan konsekwensinya-pun tidak dirasakan mereka. Rasional banget kok mas, masalah pindah partai politik itu, bisa masalah kepentingan pribadi yang sudah tidak sejalan ataupun pribadi yang menganggap partai tidak menguntungkan mereka. Untuk dicatat dalam kontestasi politik itu masuk partai ya tujuannya untuk menang. Sudah itu saja, jadi bebas mau pilih, keluar masuk partai politik itu.

11. A : terkait rasionalitas dan alasan yang sempat disinggung tadi pak, apasih rasionlitas dan alasan berpindah partai dari demokrat ke nasdem pak?

B : Alasan saya berpindah partai ya ada prospek menang mas. Kalau boleh jujur ya menang untuk berkuasa itu saja. Sampean lek ngerti, Politisi jaman saiki iki bedo karo ndhisik Mas, Partai hanya dianggap sebagai kendaraan politik, nek mbiyen kan jelas wong nasionalis pasti PDI, wong professional pengusaha yo Golkar, kyai – kyai ngelumpuk ndik PPP.

12. A : dari itu semua pak. Ada tidak faktor yang mempengaruhi untuk berpindah partai ke nasdem?

B : ada, faktor partai-nya dan faktor figure yang ada dalam partai Nasdem. Kalau faktor partai, ya karena partainya baru dan prospek untuk menang tinggi apalagi ada banyak figure yang mumpuni disitu. Bila semua orang berpartai dengan niatan untuk mencapai tujuannya sendiri, maka sikap idealis dan ideologis akan menjadi tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti ini, menurut saya posisi anggota DPRD ki paling ideal Mas kalo mau mengabdikan ndik Partai, bisa bekerja mengabdikan pada masyarakat, menyalurkan aspirasi sekaligus dapur aman. Saat ini, ya bagi saya Partai NasDem kampanye medianya Mas, jadi Restorasi Indonesia dan Politik tanpa Mahar ini cukup ngena juga bagi caleg-calge seperti kami untuk mempertimbangkan masuk NasDem.

13. A : kalau untuk figure sebagai faktor, kira-kira seperti apasih dan siapa figure tersebut pak?

B : di nasdem itu figurnya kuat kalau ditingkat nasional ada SP dan di regional atau lokal sini Pak. RA. Nah, yang mendukung saya masuk ke Nasdem salah satunya ya Pak, RA. Apalagi beliau yang meminta untuk membantu Nasdem.

14. A : kalau begitu ada kedekatan ke figure elit ya pak, ketika memutuskan untuk pindah ke Nadem.

B : ya bisa dibilang seperti itu, karena Pak. RA inilah yang saya anggap kuat dan ada harapan untuk menang.

15. A : baik pak. Mungkin poin-poin sudah saya dapatkan dalam topic ini.
Terimakasih atas waktunya



LAMPIRAN 5

Profil dan Biografi Singkat Informan 3 (SA)

Informan SA adalah seorang politisi sekaligus seorang petani apel dan hortikultura. Berdomisili di Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Narasumber SA lahir di Malang, dan lahir pada tahun 1976. Berusia 43 tahun pada saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Pendidikan Narasumber di tempuh di SD Negeri Pujon Lor, SMP Negeri Pujon and terakhir menamatkan Pendidikan setara SMA di MA Muhammadiyah 1 Malang.

Informan SA mengawali karir politik dan organisasinya dari aktivis kelompok tani, sebagai seorang petani informan SA dikenal dekat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Basis dukungan sosial-politik informan SA bersumber dari para petani melalui kelompok tani binaannya dengan jaringan yang luas dan solid. Sebelum terjun ke dunia politik SA aktif di beberapa organisasi diantaranya PII pada tahun 1993, PPPM pada tahun 1998 dan akhirnya bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 1999.

Pengalaman pendidikan lain yaitu kursus dan diklat diantaranya Diklat Kepemimpinan dari PW PII pada tahun 1994. Pada tahun 2001 informan mengikuti Diklat Ekonomi dan Kepemudaan dari PP Pemuda Muhammadiyah. Narasumber pernah menjadi Jurkam Partai Golkar dan mengikuti Diklat Lemhanas pada tahun 2013.

Begitu terjun ke dunia politik dari tahun 1997 informan SA aktif sebagai anggota partai politik tahun 1999 secara fungsionaris menjabat sebagai pengurus DPD Bidang Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup Partai Golkar. Pada tahun 2009 informan SA memantapkan diri untuk maju sebagai calon legislatif melalui Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar.

Selama aktif di Partai Golkar SA memiliki kedekatan dengan CA yaitu Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Malang saat itu, yang juga berpindah dari Partai Golkar ke Partai NasDem. SA maju dan terpilih sebagai Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dari Partai Golkar, menggantikan CA pada Dapil 7 (Karangploso,

Dau, Wagir, Pujon, Ngantang dan Kasembon) saat itu. SA dan CA berdomisili di wilayah yang sama yaitu Kecamatan Pujon.

Selain kedekatan dengan CA, narasumber SA juga memiliki kedekatan dengan RK yang merupakan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur. RK adalah Bupati Malang yang juga berpindah dari Partai Golkar ke Partai NasDem. Narasumber SA bahkan memanggil figure RK dengan sebutan “Abah”. Pada saat menjabat sebagai Anggota DPRD dari Partai Golkar, narasumber SA mengungkapkan ketidaknyamanannya di Partai tersebut. Hal ini karena, narasumber SA menganggap bahwa Partai Golkar sudah jauh dari ideologinya sebagai Partai yang membangun. Namun hanya dikuasai oleh satu-dua orang saja yang mendapatkan manfaat dari Partai Golkar. Narasumber SA lebih memiliki kedekatan dengan rekan-rekan Anggota DPRD dari Fraksi PDIP.

Narasumber SA dikenal sebagai politisi yang ramah, *friendly* dan “enakan”. SA dikenal dekat dengan konstituen, dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh narasumber SA saat memilih agenda kegiatan yang dilaksanakan. Ketika terdapat pilihan antara berkegiatan di masyarakat dan berkegiatan di kantor DPRD (kunker, rapat, dsb.), narasumber SA akan lebih memilih berkegiatan kemasyarakatan di Dapilnya. Begitu juga dengan istri narasumber SA, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. “Dengan Narasumber SA, kita bisa memiliki pertemanan secara tulus, berbeda dengan politisi lain yang kadang selalu berteman hanya arena faktor kepentingan”, ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Malang yang sudah lama mengenal SA di Partai Golkar.

Pada saat maju sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2019, narasumber SA maju melalui Partai NasDem dengan Nomor Urut 1. Nomor urut yang dianggap cukup strategis, karena memudahkan pemilih dalam mencari nama Calon Anggota Legislatif di surat suara karena posisinya yang berada di urutan paling atas dari kolom nama Calon Anggota Legislatif. Hal tersebut, menguntungkan narasumber SA, yang pada saat itu bersaing dengan beberapa kandidat Calon Anggota Legislatif yang cukup kuat, diantaranya FDK yang merupakan incumbent sekaligus Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Malang. Calon lain yang cukup kuat adalah Calon Anggota Legislatif S yang merupakan mantan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Malang.

LAMPIRAN 6

Transkrip wawancara Informan 3

Tanggal Wawancara : 26 Januari 2020
Tempat/ waktu : Rumah Bapak. SA, Pujon

Identitas Informan:

Nama : SA
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA, Pesantren Wali Songo
Pekerjaan : Petani/ Anggota DPRD

1. A: Baik Pak. Bisa dimulai wawancara nggih?
B : boleh, monggo silahkan
2. A: bisa disebutkan nama lengkap, background pendidikan dan pekerjaan saat ini atau profesi
B : Nama saya SA, profesi saya ya Petani mas, Apel dan hortikultura
3. A: kalau untuk pekerjaan saat ini, sebagai wakil DPRD kabupaten nggih pak?
B : oh itu, iya mas, saya kebetulan terpilih sebagai wakil ketua DPRD Kab. Malang ini di Dapil 7
4. A: sejak kapan pak masuk ke dunia politik pak?
B : jadi saya masuk ke politik itu dari tahun 1997 dan lebih aktif sebagai anggota politik tahun 1999 dan di Golkar secara fungsionaris di Golkar itu saya sebagai pengurus DPD bidang hukum, ham dan lingkungan hidup. Pada tahun 2009 saya terpilih sebagai anggota legislatif, dari situlah, ya ibaratkan sejarah hidup saya mencapai titik tertinggi dalam aktualisasi politik. dan itupun saya terpilih dua kali, ya dua periode menjabat sebagai anggota legislatif dua periode di partai Golkar.

5. A: menurut Pak. SA partai politik itu seperti apasih pak?

B : menurut saya partai politik itu sebagai pilar demokrasi yang harus dijunjung tinggi dan diawasi secara komprehensif. Maksud diawasi ini adalah terkait transparansi dan juga fungsi, tugas yang mereka jalankan sebagai pilar demokrasi tadi. Partai politik pada akhirnya menjadi sangat penting ketika dalam tubuh pemerintahan harus di tata dan dikelola dengan baik. Itu artinya partai politik adalah sentral karena partai politik memiliki fungsi yang bukan hanya sebagai tempat berkumpulnya para politisi yang setiap tahun ada agenda kompetisi pemilihan umum, bukan, akan tetapi, partai politik adalah sarana dan wadah bagi pemerintah untuk mendapatkan input atau masukan dalam menata pemerintahan dengan baik. Selain itu, partai politik tidak lagi menjadi bagian dari perseorangan atas dasar kepentingan pribadi, itu yang tidak boleh mas. Ya singkatnya, partai politik ada itu untuk menjembatani antara suara rakyat dan keinginan pemerintah untuk menata pemerintahan ini. Dan tujuan dari dibentuknya partai politik itu ya salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Demokrasi tanpa partai politik sulit mas.

6. A: Baik, menurut Pak. SA apa fungsi dan tugas pokok dari partai politik itu?

B : ya fungsi dari partai politik itu sebagai wadah untuk membangun relasi antar masyarakat dan pemerintah. Selain itu sebagai sarana atau media komunikasi dan edukasi politik. Tugas pokoknya partai politik itu tadi sebagai edukasi bagi masyarakat luas. Maka dari itu, tugas dan peranan dari adanya partai politik itu penting bagi perkembangan demokrasi kita ini.

7. A : Kalau menurut pemahaman Bapak. Bahwa partai sebagai Sarana media komunikasi itu seperti apa pak, jika berdasarkan pengalaman terkait persoalan di masyarakat sebetulnya, seperti perbaikan jalan, atau pembangunan infrastruktur kampung atau desa begitu?

B : ya begini mas, kalau bilanganya ke instansi Lama Mas, usulan perbaikan jalan, pembenahan saluran kalo warga yang ngomong ke Dinas atau ke Desa (Kantor Desa), semuanya sekedar ditampung”.

8. A: jika melihat dinamika politik saat ini yang, banyak orang melihat bahwa partai politik itu tidak transparan dan cenderung tidak memihak rakyat, bagaimana pak. SA melihat fenomena itu?

B : iya sih, kebanyakan saat ini yang terlihat seperti itu mas, makanya seharusnya partai politik saat ini mulai berbenah untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Jadi, kalau dalam dinamika politik apalagi menjelang pemilihan umum itu, banyak partai politik yang bermain dalam artian money politik. Nah masalah tersebutlah yang menjadi dilematis bagi tumbuh kembang partai politik saat ini.

9. A: berikut ini ada beberapa aspek yang yang mempengaruhi calon anggota legislatif berpindah partai, menurut informasi yang sudah disampaikan tadi pak. SA bahwa pindah dari partai Golkar ke Nadem. Kira-kira Visi-misi, ideologi, figure elit dan organisasional partai mana yang paling penting dan bisa dijelaskan alasannya pak?.

B: bagi saya, visi dan misi partai itu penting dilihat karena menyangkut kredibilitas dan integritas partai politik dalam dinamika politik seperti di Indonesia seperti saat ini. Jadi kalau ada partai politik tanpa adanya visi dan misi yan patut dipertanyakan, masak seperti LSM saja, LSM saja punya ADART. Dan ideologi sangatlah penting Karena ideologi adalah platform utama, terutama ya kader internal partai. lalu, tadi apa mas?, oh ya figure elit, nah kalau figure elit harus ada Karena figure elit adalah wajah partai, apabila figure elit tidak menjanjikan atau tidak representative ya mana mungkin bisa laku?. Dan yang terkahir tadi, organisasional. Organisasional ini terkait pengelolaan ya?, jelas bahwa setiap organisasi harus mempunyai pengelolaan yang baik, kalau istilah pemerintahanya *good governance* itu lo mas?. Kalau dapat di simpulkan untuk kemajuan partai politik ya ke empat aspek yang disebutkan tadi harus dilakukan semuanya kalau hanya salah satu atau dua saja ya tidak akan nada kemajuan dalam tubuh partai politik.

10. A: Baik pak. Lalu kalau menurut Pak. SA fenomena pindah partai yang saat ini marak gimana pak?

B: ya biasa saja itu mas, pindah partai itu dari dulu ada, bukan hanya saat ini saja mas. Kalau melihat ramenya kan masa Ahok itu saja. Sebelum itu juga sudah banyak. Biasa saja menurut saya

11. A: Baik. Apabila melihat rekam jejak, Pak. SA juga berpindah partai nih pak, kira-kira apasih yang mendasari untuk berpindah, bisa diberikan alasan, motif dan faktor apa saja yang mendorong untuk berpindah partai politik?

B: Sebetulnya Pindah partai politik secara umum, berat hati untuk mundur dari partai, tetapi keadaan dinamika politik lah yang mendorong saya untuk berpindah partai. jadi ada sekitar beberapa bulan itu untuk saya memfikirkan pindah partai. setelah beberapa kriteria dari partai saya lihat di Nasdem itu sesuai dengan prinsip dan kepentingan saya. Dan di beberapa waktu saya dihubungi oleh seseorang yang mengajak saya untuk pindah ke Nasdem.

12. A: kalau boleh tau siapa pak? Adakah faktor lain?

B: ya salah satu sesorang pak. RA, karena kami kan dulu pernah satu bendera dan komunikasi kita berlanjut dan baik. Sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk berpindah partai politik. Faktor dilain itu yak arena Partai tadi mas, di Partai Nadem dengan slogan Politik Tanpa Mahar yang menarik saya lebih jauh untuk mempelajari partai Nasdem dan pada akhirnya saya mantap untuuk masuk ke Nasdem. Saya kira dua aspek itu yang paling mendasari saya untuk masuk dan menetapkan berjalan dengan partai Nasdem.

13. A : adakah kriteria dari faktor lainnya pak?

B : Ya salah satunya Politik tanpa mahar iku menarik Mas, jelas!. Ya karena slogan tersebut hal baru yang memberi harapan bagi caleg terutama caleg daerah yang selama ini selalu terbentur perhitungan masalah biaya”. Sampean kalau ngerti, Sebenarnya Caleg iki yo wedi Mas dengan ancaman kasus korupsi, jadi kalo ada partai yang bisa memfasilitasi kami bisa bekerja dengan nyaman tanpa harus dikejar-kejar target yang akhirnya berakhir dengan korupsi ya kami malah senang sekali, jadi menurut saya politik tanpa mahar itu ya seperti itu”.

14. A: baik pak. Mungkin itu saja yang saya bisa gali dari keperluan tesis saya. Saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan maaf mengganggu liburannya pak.

B: ndak masalah mas, kalau ada yang perlu dibantu lagi silahkan langsung saja kontak saya ya.

15. A: baik pak, terimakasih.

LAMPIRAN 7

Profil Informan 4 (SW)

Informan SW berasal dari keluarga mantan kepala desa salah satu desa di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berdasarkan cerita dari beberapa tetangga dan warga disekitar yang tinggal di sekitar rumah di Kecamatan Gedangan, leluhur informan SW secara turun temurun juga dikenal sebagai pahlawan dalam perang kemerdekaan. Beberapa foto lama masih tersimpan dan dipajang di dinding rumah keluarga besar SW bergaya pendopo lama. Informan SW memperoleh status social dan ketokohnya tidak hanya melalui garis keturunan, aktivitas social dan politik nampaknya sudah menjadi hal lumrah dan berlaku turun temurun dalam keluarga ini.

Semenjak berusia muda, SW yang saat ini berusia 51 tahun aktif di berbagai organisasi masyarakat terutama yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Dalam sesi wawancara SW menjelaskan bahwa HWK (Himpunan Wanita Karir) Kabupaten Malang adalah organisasi pertama yang diikutinya di akhir jaman Orde Baru. Seperti kebanyakan organisasi masyarakat pada waktu itu yang menjadi *underbouw* dari Golkar, aktivitas di HWK membawa SW aktif di AMPG (Angkatan Muda Pembaharuan Golkar) dan Golkar. Selama di partai Golkar, SW menjadi salah satu kader yang disegani walaupun tidak pernah memegang jabatan politik strategis dalam struktur partai.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh peneliti dari orang-orang lama di partai Golkar, jaringan yang luas banyak dimiliki oleh informan SW terbangun karena dua factor penting yaitu profil pribadinya yang selalu terbuka dan ramah serta dekat dengan siapa saja. Informan SW lebih terlihat sebagai aktivis social adripada politik karena tidak pernah memperlihatkan ambisi maupun terlibat konflik untuk jabatan politik di partai. Faktor kedua yang membuat informan SW mudah diterima oleh berbagai kalangan dan faksi di dalam partai Golkar Kabupaten Malang adalah kedekatannya secara personal dengan sosok RK, Bupati Malang yang maju dari Partai Golkar pada Pilkada 2009.

Kedekatan personal ini terbangun semenjak lama karena dalam sejarahnya RK memulai karir politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang dari Dapil Gedangan. Keluarga Informan SW adalah pendukung utama pencalonan RK di awal

masa karirnya. Mereka menjadi jembatan antara RK dengan masyarakat setempat konstituen dan calon pemilih di dapil Gedangan. Saat menjadi anggota DPRD pun, keluarga SW menjadi saluran aspirasi utama masyarakat Gedangan terhadap RK sehingga posisi saling bekerja sama ini bertahan cukup lama hingga RK mencalonkan diri sebagai Bupati Malang pada tahun 2009. Hubungan yang panjang ini menjadikan tingkat kedekatan personal informan SW dengan RK menjadi bersifat sangat kekeluargaan, bukan lagi sekedar hubungan politik.



LAMPIRAN 8

Transkrip wawancara Informan 4

Tanggal Wawancara : 13 Januari 2020

Tempat/ waktu : Rumah Ibu. SW

Indentitas Informan:

Nama : SW

Umur : 52 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. A : Assalamualaikum, Bu. Maaf kalau mengganggu waktunya, ini tujuan saya datang kesini untuk mewawancarai Ibu. SW sebagai narasumber penelitian tesis saya, terkait perpindahan calon anggota legislatif pindah partai.

B : waalaikumsalam, mas. Iya, boleh, tetapi saya takut mau jawab apa nantinya, heheee.

2. A : iya ibu. Ini hanya terkait dengan penelitian tesis jadi tidak ada yang perlu ditakutkan untuk menjawab karena pertanyaanya dan respondenya rahasia kok bu.

B : Nggih, boleh.

3. A : : baik. Ibu. Untuk nama lengkap siap nggih?,

B: : SW.

4. A : : Umur dan pendidikan terakhir dan pekerjaan saat ini apa Bu. Nggih?

B : umur saya 52th Mas, pendidikan terakhir SMA, saat ini saya Ibu Rumah Tangga.

5. A : pertanyaan ini berkaitan dengan pengalaman di partai politik. Sejak kapan Ibu. SW ikut serta dalam partai politik?

B : saya ikut dalam partai politik sejak tahun 1992-2014 di Partai Golkar.

6. A : untuk di partai Golkar sendiri sebagai apa BU?
- B : Saya sebagai pengurus partai, tepatnya Bendahara partai di DPC.
7. A : kira-kira selain di pengurus partai Golkar, kegiatan atau aktif di apa bu?
- B : Saya aktif di kegiatan masyarakat yaitu HWK (Himpunan Wanita Karir). Berkaitan dengan kegiatan tersebut, keterlibatan saya di organisasi masyarakat, saya sempat vakum selama 5 tahun di dunia politik, karena masa itu terpengaruh akibat dinamika partai yang tidak menentu sehingga membuat saya untuk tidak ikut serta dan aktif dalam dunia politik.
8. A : kira-kira Ibu. Ketika terjun kedua politik atau ikut masuk dalam partai politik apa sih yang mendorong untuk terjun ke politik?
- B : ya, sebetulnya ada beberapa aspek yang mempengaruhi saya untuk ikut dalam partai politik, tetapi aspek yang paling berpengaruh adalah faktor kedekatan atau rasa kekeluargaan.
9. A : bisa dijelaskan aspek kekeluargaan tersebut BU?
- B : Kedekatan tersebut sebetulnya punya cerita panjang mas, tapi bisa di lihat dengan jelas saya terlibat dalam partai politik adalah unsur kekeluargaan yang diperlihatkan oleh Pak. RA yang pada waktu itu di partai Golkar. Beliau saya anggap sebagai Bapak sendiri. Hal ini karena beliau ketika turun ke bawah selalu mengedepankan sisi kekeluargaan sehingga membuat saya ikut beliau. Jadi apapun yang Bapak, minta atau menyuruh saya selalu mengiyakan. Tidak ada sosok yang seperti Beliau dalam merangkul dan juga memperlakukan kolega yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Tetapi Bapak, selalu men support segala bentuk apapun untuk saya, dan bukan hanya saya tetapi semua orang. (saya jadi ingat Bapak kalau begini mas) *sambil menangis.
10. A : baik, kalau untuk bisa pindah ke partai Nasdem ini seperti apa bu, perjalanannya?
- B : saya mulai masuk ke Nasdem itu kira-kira tahun 2017 mas. Dan itupun atas dorongan dan permintaan Ibu (Istri Pak. RA). Beliau bilang pada waktu itu, untuk membantu DP (anak Pak. RA dan Ibu. JJ) yang pada waktu itu mencalonkan ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan.
11. A : sekarang pertanyaan tentang kepartaian Bu. Menurut Ibu. Partai Politik itu seperti apa bu?
- B : Maksudnya gimana mas?
12. A : misalkan begini bu, menurut Ibu. Partai politik itu kan mempunyai fungsi dan peran dalam demokrasi Indonesia ini, nah menurut pemahaman Ibu itu partai

politik itu seperti apa menurut pengetahuan Ibu selama berkecimpung dalam partai politik.

B : OH, ya, partai politik itu seperti wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, nah aspirasi ini sering hanya didengar dan menjadi perbincangan saja di tengah masyarakat. Maka dari itu dengan adanya partai politik seharusnya dapat berperan dan berfungsi seperti itu mas. Dan sepengetahuan saya partai politik adalah sebagai jembatan bagi masyarakat agar keluhan-ya di dengar, misalkan isu terkait kepemudaan, urusan wanita dalam rumah tangga dll. Dan saya ketika ikut dalam partai Golkar banyak mendengar wacana dan keluhan dari Ibu-ibu sehingga biasanya saya tuangkan dalam kegiatan masyarakat di kelompok-kelompok kerja misalkan PKK, Kegiatan program Lansia, posyandu dll. Intinya mas. ya, Partai lebih lebih cepet Mas, karena mereka kan punya anggota DPRD, nek sing nelpon anggota DPRD wes langsung beres Birokrasine”.

13. A : menurut Ibu, di bentuknya partai politik itu buat apa sih bu sebenarnya?

B : Ya, apabila digunakan untuk politisi yang menginginkan menjadi anggota dewan ya lewat partai politik, atau apa istilahnya mas? Kendaraan ya?

14. A : Kendaraan politik?

B : Iya betul, partai politik ya kendaraan politiknya untuk mencapai tujuan politik itu sebenarnya, tapi kalau saya tidak melihat partai politik seperti itu. Bagi saya partai politik hanya sebagai wadah aspirasi yang nantinya akan dibawa ke legislatif ataupun eksekutif begitu mas. Selain itu bagi saya yang terpenting adalah membesarkan partai itu ya kewajiban, misalnya untuk itu saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tapi tidak menang di tahun 2014 kemarin. Tetapi meskipun tidak terpilih saya sudah bangga karena sudah ikut membesarkan partai dengan tulus tanpa embel-embel dibelakangnya.

15. A : kalau untuk berkaitan dengan tugas pokok dari partai politik bu, seperti apa?

B : Ya, partai politik itu tugasnya sebagai wadah tadi, ehmmmm oh iya, partai politik juga tugasnya memberikan informasi politik yang baik. Disini di Gedangan ini, saya ditunjuk sebagai ketua partai Nasdem dan yang saya lakukan adalah memberikan informasi politik terkait agenda-agenda partai dan negara. Ya, salah satunya adalah dengan aktif dalam kegiatan masyarakat tadi.

16. A : Menurut Ibu. SW, apakah dalam iklim demokrasi seperti saat ini, di Indonesia partai politik itu masih penting?

B : ya, penting banget mas, misalkan tadi fungsi dan tugas pokoknya adalah memberikan informasi dan wadah, saat ini partai politik menjadi tumpuan, mengingat informasi saat ini terkadang banyak kelirunya entah itu memang di seting seperti itu atau bagaimana ya,?! fungsi salah satu dari partai politik adalah untuk meneruskannya, hal ini sesuai dengan keberadaanya yang istilahnya sebagai

jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Posisinya partai politik kan di tengah mas. Partai politik itu alat perjuangan yang harus di kerja keraskan mas.

17. A : Menurut Ibu, saat ini yang terpenting dalam kelembagaan partai politik itu apa, misalnya kaderisasi atau pa bu?

B : Saat ini itu dalam partai politik yang paling penting adalah sistem kaderisasi mas, kenapa begitu, karena banyak partai baru namun tidak jelas arahnya, misalkan kalau dahulu saya di Golkar kaderisasi itu seperti indoktrinasi yang harus melekat di setiap sendi kehidupan kita, maka tidak heran Golkar itu sangat solid. Dan apalagi kalau sampean tahu, saat ini banyak partai politik tidak paham akan kaderisasi karena kandidat atau calon yang ingin naik ke legislatif malah merekrut dari luar misalnya mengangkat seorang aktor atau aktris. Dalam hal ini seharusnya tidak terjadi, seolah kaderisasi atau pendidikan kader dari kelembagaan partai tidak matang dan tidak percaya pada partainya sendiri.

18. A : menurut Ibu yang sudah lama berkecimpung dalam kepartaian, banyak calon anggota legislatif yang berpindah partai, bagaimana sih pandangan ibu terkait fenomena pindah partai itu bu?

B : ya sebetulnya sah-sah saja mas, toh, perpindahan partai ke partai politik lainnya tidak merugikan satu sama lainnya. Saat ini memang marak tapi kan punya alasan dan landasan kuat ketika ingin berpindah partai lain, mungkin ada sesuatu kita enggak tau.

19. A : berkaitan dengan pindah partai tadi bu, ini kan ibu juga berpindah partai dari Golkar ke Nasdem, apasih bu. Alasan ibu berpindah partai ke Nasdem?

B : sebetulnya saya tidak ada niatan, apapun partainya saya ok mas. Tapi ada rasa kekeluargaan yang tidak saya dapatkan di tempat lain, maka dari itu saya ikut ketika Pak. RA berpindah sebelumnya dan ada permintaan dari Ibuk. Yang meminta saya untuk membantu Mas. DP itu saja. Saya ditelpon oleh Bapak (RA), untuk membantu Beliau di NasDem Mas, karena dulu saya berpartai juga karena hubungan dekat dengan Bapak, maka saya juga ndak keberatan.

20. A : Ada tidak bu motivasi selain keluarga/ kekeluargaan tadi?

B : Tidak ada mas, ya, faktor dari Pak, RA yang sudah saya anggap sebagai Keluarga, Bapak saya sendiri.

21. A : motif lainnya kira? ingin menjadi anggota dewan begitu?

B : Yo iku mau mas, lha yo podo wae Mas, saya itu ndak pernah berpikir jadi anggota DPRD atau jabatan lainnya, tapi begitu Bapak ngendikan agar saya mau maju untuk Dapil sini ya saya manut saja.

21. A : lalu, ada faktor lain tidak bu?

B : ya, itu tadi mas, saya sudah satu rasa keluarga dengan Bapak. Saya kira juga visi dan misi dari partai juga menarik buat saya untuk berpindah partai.

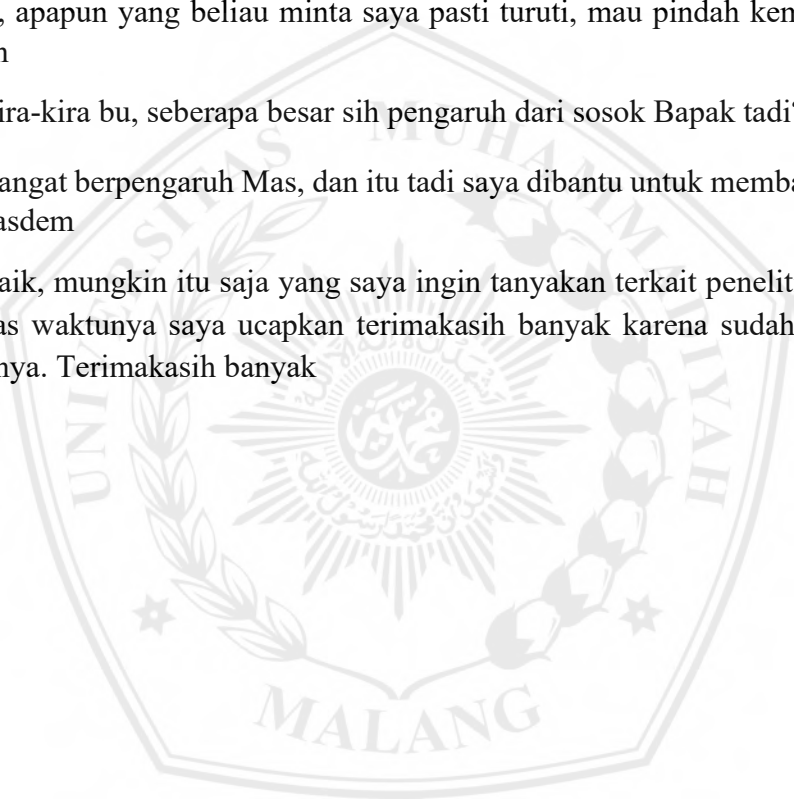
22. A : Kalau faktor di lain keluarga, apa Bu?

B : Yak arena sosok Bapak Tadi mas. Bagaimana ya, saya itu tidak bisa lepas dari Bapak, apapun yang beliau minta saya pasti turuti, mau pindah kemanapun saya iya kan

23. A : kira-kira bu, seberapa besar sih pengaruh dari sosok Bapak tadi?

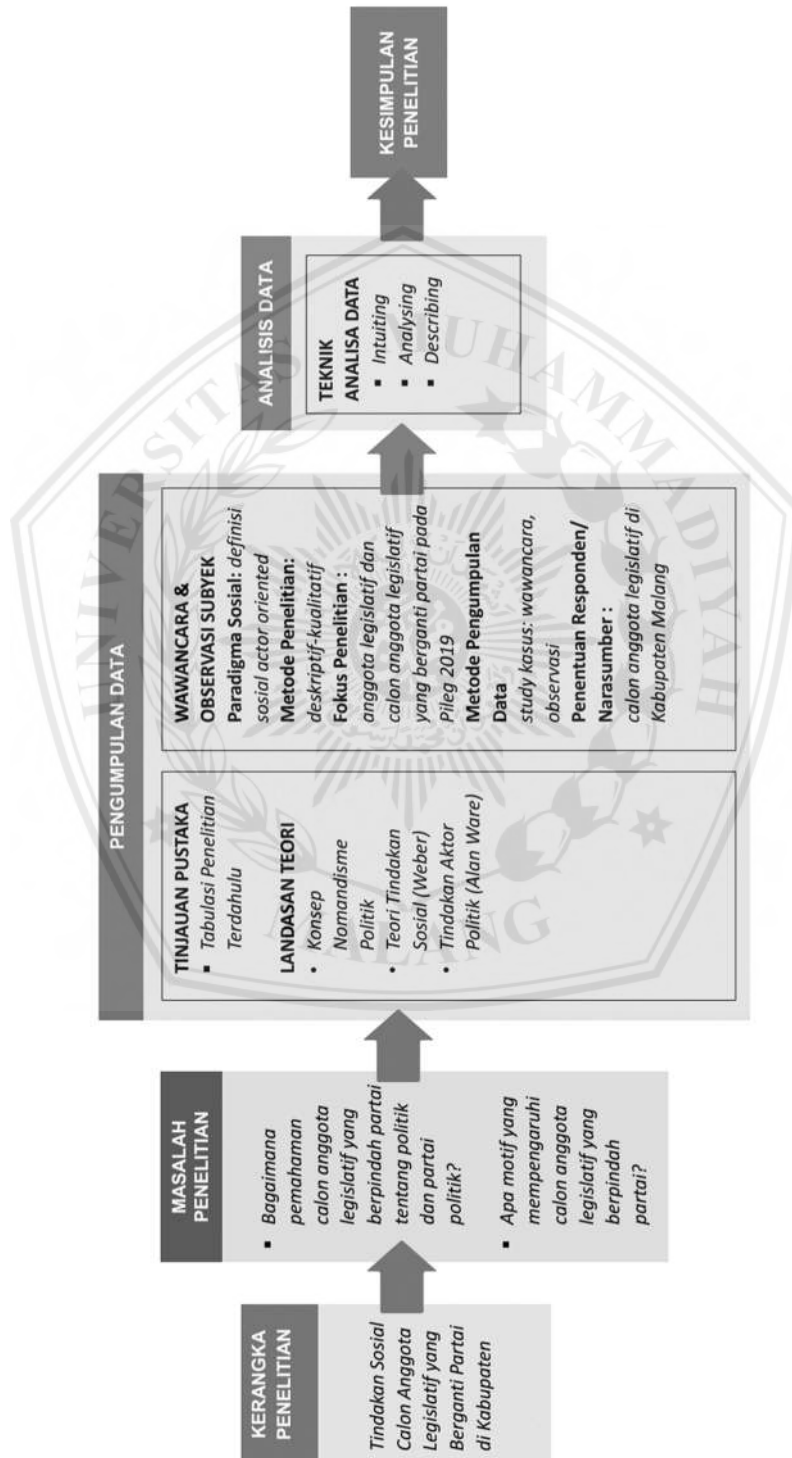
B : Sangat berpengaruh Mas, dan itu tadi saya dibantu untuk membantu Mas. DP dan Nasdem

24. A : baik, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan terkait penelitian tesis saya ini, atas waktunya saya ucapkan terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Terimakasih banyak



LAMPIRAN 9

Diagram Kerangka Penelitian



LAMPIRAN 10

Diagram Hubungan Pemahaman terhadap Partai Politik dengan Motif Perpindahan Partai politik

